

Dr. Sutoyo, M.Pd

**MODEL PEMBELAJARAN *CONTEXTUAL VALUE*
CLARIFICATION TECHNIQUE (CVCT) BERBASIS
MOTIVASIONAL DALAM PEMBELAJARAN PPKn**

Penerbit

UNISRI PRESS

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1987

Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982

Tentang Hak cipta

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (i) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1(satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
2. Barang siapa menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

Sutoyo

*Model Pembelajaran Contextual Value Clarification Tehcnique (CVCT)
Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn.*

Cetakan 1. Unisri Press, Surakarta 2019

**Model Pembelajaran Contextual Value Clarification Tehcnique (CVCT)
Berbasis Motivasional Dalam Pembelajaran PPKn**

Hak Cipta@. Sutoyo 2019

Penulis

Dr. Sutoyo, M.Pd

Editor

Dr. Sri Handayani, S.Pd., M.Hum

Ilustrasi Sampul

Gilang Design

Penerbit

Universitas Slamet Riyadi (Unisri Press)

Jl. Sumpah pemuda No. 18 Joglo

Banjarsari Surakarta.

unisripress@gmail.com

Anggota APPTI

Cetakan I, Edisi I Oktober 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reseved

ISBN 978-602-73158-9-1

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya buku model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT) berbasis motivasional dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dapat diselesaikan dengan baik.

Buku model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT) berbasis motivasional dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini disusun sebagai upaya untuk meningkatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Buku ini menguraikan tentang problematika pembelajaran PPKn di sekolah, pentingnya pendidikan nilai-nilai Pancasila, konsep model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT), konsep Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), konsep internalisasi nilai-nilai Pancasila, model contextual values clarification technique (CVCT) untuk pendidikan internalisasi nilai-nilai Pancasila, dan pengembangan model pembelajaran Contextual Value Clarification Technique (CVCT).

Penulis mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam penyelesaian buku ini. Semoga buku ini bermanfaat bagi para pembaca.

Surakarta, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN MUKA	i
HALAMAN KATA PENGANTAR	ii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	7
A. Profil Pembelajaran PPKn.....	7
B. Pentingnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.....	10
BAB II. KONSEP DASAR PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN	14
A. Pengertian Model Pembelajaran.....	14
B. Model Pembelajaran Menurut Para Ahli	15
BAB III. MODEL CVCT BERBASIS MOTIVASIONAL	30
A. Model Pembelajaran CVCT.....	30
B. Motivasi ARCS	46
C. Desain Model CVCT	49
D. Model Hipotetik.....	50
E. Sintaks Model CVCT.....	59
BAB IV. KONSEP PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN	63
A. Hakikat Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	63
B. Tujuan dan Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	63
C. Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.....	65
BAB V. INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA	69
A. Hakikat Internalisasi Nilai.....	69

B. Pengamalan Pancasila	76
DAFTAR PUSTAKA	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Profil Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Sekolah.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dari jenjang Sekolah Dasar sampai jenjang Sekolah Menengah Tingkat Atas. Mata pelajaran PPKn diberikan di sekolah dalam rangka untuk memberikan bekal kepada peserta didik tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu pelaksanaan pembelajaran PPKn di sekolah hendaknya diupayakan agar terwujud pemahaman peserta didik terhadap pemahaman Pancasila secara utuh.

Ada beberapa komponen yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemahaman Pancasila peserta didik dalam pembelajaran PPKn, diantaranya guru, peserta didik, materi, dan media pembelajaran. Komponen guru memegang peranan penting dalam proses pembelajaran, sehingga guru dituntut untuk menguasai aspek perencanaan, dan pelaksanaannya.

Jika dilihat realita pembelajaran PPKn saat ini, dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pada umumnya guru yang mengajar mata pelajaran PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan memiliki kualifikasi pendidikan S1 PPKn. Bahkan ada juga yang memiliki jenjang pendidikan S2. Kualifikasi S2 para guru PPKn SMK bukan berasal dari S2 PPKn tetapi S2 non PPKn, Misalnya S2 pendidikan sejarah dan S2 manajemen pendidikan.
2. Pada umumnya upaya guru dalam rangka meningkatkan kompetensi pedagogis dan kompetensi profesionalnya kurang, sehingga proses pembelajarannya kurang berkualitas.

3. Pada umumnya kemampuan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran masih rendah. Hal ini terbukti masih banyak guru yang mengalami kesulitan dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, Sehingga perangkat pembelajaran yang berupa RPP kadang dibuat kadang tidak. Bahkan kalau ada tidak disiapkan dengan baik dan benar. Pada umumnya guru berpendapat yang penting RPP ada, sekedar untuk memenuhi kewajiban, bahwa guru harus menyusun RPP.
4. Masih banyak guru PPKn di Sekolah Menengah Kejuruan se-Solo Raya yang belum memahami secara teori dan implementasi model-model pembelajaran yang inovatif. Bagi guru yang sudah mengetahui model-model pembelajaran belum diimplementasikan dalam proses pembelajaran dengan baik. Guru dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah bervariasi.
5. Pada umumnya guru dalam proses pembelajaran kurang mempersiapkan materi dengan baik, karena para guru beranggapan, bahwa mengajar merupakan tugas sehari-hari yang sudah dilaksanakan bertahun tahun, sehingga materinya sudah hafal. Padahal sebagai seorang guru harus selalu meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan materi yang disesuaikan dengan perkembangannya. Dalam proses pembelajaran para guru pada umumnya menggunakan lembar Kerja Siswa (LKS).
6. Para guru dalam mengajar pada umumnya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik dan tidak melakukan evaluasi sesuai

tuntutan kurikulum 2013. Dalam melakukan evaluasi hanya menekankan pada aspek pengetahuan.

7. Dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran guru kurang memperhatikan aspek motivasi peserta didik. Dimana dalam pembelajarannya kurang memperhatikan apakah materinya itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau tidak. Kurang memperhatikan apakah materi yang dirancang dan diberikan itu sesuai dengan keadaan dan kondisi peserta didik atau tidak. Disamping itu guru kurang memberikan pengakuan terhadap apa yang sudah dilakukan peserta didik, sehingga peserta didik kurang memiliki kepercayaan diri dan jarang melakukan evaluasi apakah materi yang telah diberikan itu memberikan manfaat dan kepuasan kepada peserta didik baik secara langsung atau tidak langsung.
8. Dalam pembelajaran PPKn yang seharusnya internalisasi nilai-nilai pancasila ditanamkan kepada peserta didik yang menjadi ciri dalam pembelajarannya yang mengarah untuk membentuk sikap kurang terimplementasikan dengan baik. Justru penyampaian pengetahuan yang lebih dominan.
9. Pada umumnya peserta didik merasa kurang tertarik dengan proses pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini dikarenakan guru dalam mengajar hanya ceramah. Indikatornya adalah pada saat guru

mengajar peserta didik banyak yang ramai dan kurang konsentrasi, bahkan ada yang mengantuk

10. Materi pelajaran PPKn sulit dipahami, materinya berupa pengetahuan yang menuntut peserta didik banyak menghafal bukan menuntut penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Materi yang diajarkan kurang sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik, tidak dikaitkan dengan kondisi dan lingkungan peserta didik, bahkan materi yang diterima peserta didik kurang bermanfaat.
11. Peserta didik motivasinya rendah dalam mengikuti pelajaran PPKn, karena materinya dirasakan kurang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, kurang relevan dengan keadaan peserta didik, guru kurang memberi penghargaan dan pengakuan kepada peserta didik sehingga kepercayaan dirinya kurang, pelajarannya dirasakan tidak memberi manfaat dan kepuasan kepada peserta didik.
12. Peserta didik beranggapan bahwa Pelajaran PPKn bukan pelajaran yang dapat memberikan keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal untuk bekerja setelah lulus. Peserta didik beranggapan bahwa PPKn merupakan mata pelajaran pelengkap saja.
13. Tingkat Internalisasi nilai-nilai Pancasila peserta didik masih rendah.

B. Pentingnya Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila.

Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia mengandung konsekuensi, bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus berdasarkan pada nilai-

nilai Pancasila. Artinya bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dipahami dan diaktualisasikan oleh setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang dimaksud adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam sila Ketuhanan yang Maha Esa, sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, sila Persatuan Indonesia, sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam aspek penyelenggaraan negara dan pemerintahan nilai-nilai sila Ketuhanan, sila Kemanusiaan, sila Persatuan, sila Kerakyatan, dan sila keadilan harus diaktualisasikan secara kongkrit. Ini berarti, bahwa semua produk penyelenggara negara dan pemerintah, baik yang berada di eksekutif, legislatif, yudikatif dari pusat sampai daerah dalam membuat dan menghasilkan peraturan perundangan maupun kebijakkan lainnya harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Di samping itu pada tataran implementasi dalam kehidupan bermasyarakat seluruh warga negara Indonesia harus berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Ini berarti juga, bahwa seluruh warga negara Indonesia harus mengaktualisasikan nilai-nilai sila Ketuhanan, sila Kemaanusiaan, sila Persatuan, sila kerakyatan, dan sila Keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu Internalisasi nilai-nilai Pancasila menjadi sesuatu hal yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia saat sekarang dihadapkan pada berbagai persoalan. Persoalan yang dihadapi bangsa ini tidak hanya persoalan perilaku penyelenggara negara maupun masyarakat Indonesia pada umumnya, namun

juga permasalahan dunia. antara lain : stabilitas ekonomi, korupsi, kemiskinan, pengangguran, bencana alam, dan hak asasi manusia. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila seharusnya bangsa ini mampu menyelesaikan segala persoalan dengan baik. Hal ini disebabkan keunggulan Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur yang juga dikagumi oleh negara-negara di dunia.

Jika dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan serta dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara tidak berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila maka akan berdampak negatif secara luas terhadap bangsa dan negara. Stabilitas negara akan terganggu, roda perekonomian bangsa terhambat, pembangunan nasional tidak akan tercapai. Misalnya, 1). Konflik agama yang terus menerus terjadi yang banyak merugikan korban jiwa dan materi akan menghambat lajunya perekonomian mikro; 2). Kekerasan yang terjadi setiap saat, munculnya pembunuhan dimana-mana, terjadinya penindasan dari yang kuat kepada yang lemah, penindasan penguasa kepada rakyatnya, ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam persamaan derajat. Hal ini akan membuat suasana dalam kehidupan masyarakat tidak nyaman; 3). Munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Papua Merdeka (GPM) dan gerakan seperatis yang lain akan mencederai persatuan dan kesatuan bangsa; 4). Menurunnya sikap menghargai pendapat orang lain, mementingkan egonya sendiri, implementasi demokrasi yang berlebihan, bertindak dengan mengatas namakan rakyat dan berlindung di bawah nama besar rakyat ini justru

menciderai nilai demokrasi; 5). Munculnya perlakuan tidak adil dari para penguasa, tidak adanya keadilan dibidang hukum, gaya hidup mewah akan membuat ketimpangan-ketimpangan sosial di masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut penting dilakukanya upaya internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran PPKn. Hal ini disebabkan internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan pendidikan nilai Pancasila melalui pemahaman, penghayatan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan.

BAB II

KONSEP DASAR PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN

A. Pengertian Model Pembelajaran

Ada beberapa pengertian model. Istilah model memiliki makna ganda yakni, teladan, tiruan, bentuk, pola dan rancangan (Bell,1995 :77). Menurut Briggs (1986 :23) model dapat diartikan sebagai seperangkat prosedur secara berurutan untuk mewujudkan suatu proses pembelajaran, atau suatu cara untuk membawa siswa memperoleh informasi, gagasan,skill, nilai, cara berpikir mengekspresikan diri mereka sendiri sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan kapabilitas mereka untuk belajar lebih mudah dan efektif. Rauner & Maclean (2008 : 49) berpendapat bahwa model adalah pengganti dari suatu sistem yang sebenarnya diarahkan untuk keperluan penyelidikan suatu eksperimen.

Banyak ahli yang mengemukakan tentang pengertian model pembelajaran. Sagala (2009 : 148) mengemukakan bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar peserta didik untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi perancang pembelajaran dan guru dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas belajar. Ahli lain menyatakan bahwa model pembelajaran dapat diartikan sebagai pola yang digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembelajaran di kelas (Supriyono, 2009 : 46). Sementara Jacobsen, Eggen dan

Kauchak (2009) menyatakan bahwa model pembelajaran dimaksudkan sebagai strategi perspektif pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pembelajaran. Menurut Arends (1997) ada empat ciri model pembelajaran, yakni : (1) rasional teoritis yang bersifat logis yang bersumber dari rancangan, (2) dasar pemikiran tentang tugas pembelajaran yang hendak dicapai dan bagaimana siswa belajar untuk mencapai tujuan tersebut, (3) aktivitas guru yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan, (4) lingkungan belajar diperlukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

B. Model Pembelajaran Menurut para Ahli

1. Joyce, Well dan Calhoun (2011:13) mengemukakan bahwa ada empat rumpun model, yakni :

- a. *The Information Processing Models* (model pemrosesan informasi. Rumpun model ini berpijak dari prinsip-prinsip pengolahan informasi oleh manusia untuk memperkuat dorongan dari dalam untuk memahami sesuatu dengan cara melakukan penggalian dan pengorganisasian. Pada rumpun ini terdapat tujuh model pembelajaran, yakni : 1) *Concept Attainment* (pencapaian konsep); 2) *Inquiry Training* (latihan penelitian); 3) *Inductive Thinking* (berpikir induktif); 4) *Advance Organizer* (Pemandu Awal); 5) *Memorization* (memorisasi); 6) *Develoving Intellect* (Pengembangan Intelek); 7) *Scientific Inquiry* (penelitian ilmiah).

b. *Personal Models* (model personal). Rumpun model personal bertolak dari pandangan keakuan dari individu. Dimana proses pendidikan sengaja dilakukan supaya seseorang dapat memahami diri sendiri secara baik. Disamping itu seseorang harus dapat memiliki tanggung jawab serta dapat mewujudkan kualitas hidup secara baik. Dengan kata lain rumpun model personal ini menekankan pada kemandirian dalam mewujudkan tujuannya. Terdapat empat model pembelajaran dalam rumpun model personal, yakni : 1) *Non Directive Teaching* (pengajaran tanpa arahan); 2) *Synetics Models* (model sinetik); 3) *Awareness Training* (latihan kesadaran); 4) *Classroom Meeting* (pertemuan kelas).

c. *Social Models* (model interaksi sosial). Rumpun model interaksi sosial ini menekankan pada pengembangan kerjasama antar siswa. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu permasalahan dapat dipecahkan melalui kesepakatan dan musyawarah. Kesepakatan dan musyawarah merupakan proses-proses sosial. Proses sosial yang demokratis perlu terus diwujudkan. Ada lima model pembelajaran dalam rumpun interaksi sosial, yakni : 1) *Group Investigation* (investigasi kelompok); 2) *Role Playing* (bermain peran); 3) *Jurisprudential Inquiry* (penelitian yurisprudensi); 4) *Laboratory Training* (latihan laboratorium); 5) *Social Science Inquiry* (penelitian ilmu sosial).

d. *Behavioral Systems* (sistem perilaku). Rumpun model ini menekankan pada penciptaan sistem lingkungan belajar yang memungkinkan manipulasi penguatan tingkahlaku secara efektif sehingga terbentuk pola tingkahlaku yang dikehendaki. Rumpun model sistem perilaku terdapat lima model pembelajaran, yakni : 1) *Mastery Learning* (belajar tuntas); 2) *Direct Instruction* (pembelajaran langsung); 3) *Learning Self Control* (belajar kontrol diri); 4) *Training for Skill and Concept Development* (latihan keterampilan dan pengembangan konsep); 5) *Assertif Training* (pelatihan assertif).

Keempat rumpun model tersebut di atas kesemuanya memiliki empat komponen, yakni : (1) *Syntac* (sintak) yaitu langkah-langkah operasional pembelajaran atau urutan kegiatan yang sering disebut fase; (2) *Social system* (sistem sosial) yaitu suasana dan norma yang berlaku dalam pembelajaran. Hal ini mengarah pada peranan guru dan siswa serta aturan yang dibutuhkan; (3) *Principles of reaction* (prinsip-prinsip reaksi) yaitu memberi gambaran kepada guru tentang bagaimana memandang, memperlakukan atau merespon pertanyaan peserta didik; (4) *Support System* (sistem pendukung) yaitu segala sarana, alat bahan atau lingkungan belajar yang mendukung model pembelajaran yang digunakan; (5) *Instructional and Nurturent effecs* (dampak instruksional dan

dampak pengiring) yaitu hasil yang akan dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran.

2. Kemp (2001) mengemukakan model desain sistem pembelajaran yang berbentuk lingkaran atau *cycle*. Menurut Kemp model yang berbentuk lingkaran menunjukkan adanya proses yang kontinyu dalam menerapkan desain sistem pembelajaran. Adapun komponen model desain sistem pembelajaran menurut Kemp meliputi :
 - a. Mengidentifikasi masalah dan menetapkan tujuan pembelajaran.
 - b. Menentukan dan menganalisis karakteristik siswa.
 - c. Mengidentifikasi materi dan menganalisis komponen-komponen tugas belajar yang terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran.
 - d. Menetapkan tujuan pembelajaran khusus bagi siswa.
 - e. Membuat sistematika penyampaian materi pelajaran secara sistematika dan logis.
 - f. Merancang strategi pembelajaran.
 - g. Menetapkan metode untuk menyampaikan materi pelajaran.
 - h. Mengembangkan instrumen evaluasi.
 - i. Memilih sumber-sumber yang dapat mendukung aktivitas pembelajaran.

Dari kesembilan komponen ini memungkinkan penggunaanya untuk memulai kegiatan desain dari komponen yang mana saja.

3. Ada model lain yang dikemukakan oleh Smith dan Ragan (2003), yang mengemukakan bahwa ada beberapa langkah dan prosedur model desain sitem pembelajaran, yakni :
 - a. Analisis lingkungan belajar. Analisis lingkungan belajar ini meliputi prosedur menetapkan kebutuhan akan adanya proses pembelajaran dan lingkungan tempat program pembelajaran akan diimplementasikan. Tahap ini digunakan untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah-masalah pembelajaran.
 - b. Analisis karakteristik siswa. Karakteristik siswa yang perlu dianalisis adalah kondisi sosial ekonomi, gaya belajar dan penguasaan isi materi pelajaran.
 - c. Analisis tugas pembelajaran. Tahap ini merupakan langkah yang dilakukan untuk membuat deskripsi tugas-tugas dan prosedur yang perlu dilakukan oleh individu untuk mencapai tingkat kompetensi dalam melakukan jenis pekerjaan.
 - d. Menulis butir tes. Menulis butir-butir tes dilakukan untuk menilai apakah program pembelajaran yang dirancang dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

- e. Menentukan strategi pembelajaran Strategi pembelajaran dilakukan untuk mengelola program pembelajaran yang didesain agar dapat membantu siswa dalam melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Strategi pembelajaran dalam konteks ini dapat diartikan sebagai siasat yang perlu dilakukan oleh instruktur agar dapat membantu siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal.
- f. Memproduksi program pembelajaran. Memproduksi program pembelajaran mempunyai makna adanya proses atau aktivitas dalam menerjemahkan desain sistem pembelajaran yang telah dibuat kedalam bahan ajar atau program pembelajaran. Program pembelajaran merupakan *output* dari desain sistem pembelajaran yang mencakup deskripsi tentang kompetensi atau tujuan, metode, media, strategi dan materi pembelajaran, serta evaluasi hasil belajar.
- h. Melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ini untuk menemukan kekurangan-kekurangan dari draf bahan ajar yang telah dibuat untuk segera direvisi agar menjadi program pembelajaran yang efektif, efisien dan menarik. Evaluasi formatif pada umumnya dilakukan terhadap *prototipe* program pembelajaran yang sedang dikembangkan.
- i. Merevisi program pembelajaran. Revisi program pembelajaran dilakukan terhadap kelemahan-kelemahan yang masih

nampak pada rancangan atau draf program pembelajaran. Melalui revisi terhadap draf program pembelajaran maka program tersebut diharapkan dapat menjadi program pembelajaran yang berkualitas.

4. Model desain sistem pembelajaran yang lain yang memperlihatkan tahapan-tahapan yang sederhana adalah model ADDIE (*Analysis, Desain, Development, Implementation, dan Evaluation*). Adapun Komponen-komponen model ADDIE adalah :

- a. Analisis.

Pada tahap ini dilakukan analisis kebutuhan untuk menentukan masalah dan solusi yang tepat dan menentukan kompetensi siswa.

Langkah analisis terdiri analisis kinerja (*performance analysis*) dan analisis kebutuhan (*need analysis*). Analisis kinerja dilakukan untuk mengetahui apakah masalah kinerja yang dihadapi memerlukan solusi berupa penyelenggaraan program pembelajaran. Sedangkan analisis kebutuhan merupakan langkah yang diperlukan untuk menentukan kemampuan-kemampuan atau kompetensi yang perlu dipelajari oleh siswa untuk meningkatkan kinerja atau prestasi belajar. Hal ini dapat dilakukan apabila program

pembelajaran dianggap sebagai solusi dari masalah pembelajaran yang sedang dihadapi.

b. Desain.

Pada tahap ini merupakan langkah menentukan kompetensi khusus, metode, bahan ajar, dan strategi pembelajaran. Pada tahap ini desain yang dibuat harus dapat menjawab pertanyaan, diantaranya : a). Kompetensi khusus apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah menyelesaikan pembelajaran; b). Indikator-indikator apa yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran; c) peralatan dan kondisi bagaimana yang diperlukan oleh siswa agar dapat melakukan unjuk kompetensi baik pengetahuan, sikap dan keterampilan setelah mengikuti pembelajaran; d). Bahan ajar dan kegiatan seperti apa yang dapat digunakan dalam mendukung program pembelajaran.

c. Pengembangan.

Tahap ini merupakan tahap memproduksi program dan bahan ajar yang akan digunakan dalam program pembelajaran.

d. Implementasi.

Tahap ini dilaksanakan program pembelajaran dengan menerapkan desain program pembelajaran yang telah

dirancang. Dengan kata lain Implementasi merupakan langkah penyampaian materi pembelajaran dari model desain sistem pembelajaran. Langkah ini mempunyai makna adanya penyampaian materi pembelajaran dari guru kepada siswa.

e. Evaluasi.

Langkah ini merupakan proses untuk mengevaluasi terhadap program pembelajaran dan evaluasi hasil belajar. Evaluasi dapat dilakukan selama atau sepanjang pelaksanaan kelima langkah dalam model ADDIE.

5. Disisi lain Dick and Carey (2009) dalam pandangannya tentang desain model pengembangan pembelajaran menyatakan ada 10 komponen dalam desain model pembelajaran. Adapun sepuluh komponen yang dimaksud, adalah sebagai berikut :

a. *Assess needs to Identify goals* (analisis kebutuhan dalam rangka menentukan tujuan).

Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menerapkan model desain sistem pembelajaran ini adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki siswa setelah menempuh program pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran dapat dikembangkan baik dari rumusan tujuan pembelajaran yang sudah ada pada silabus maupun dari hasil analisis kinerja atau *performance analysis*. Rumusan tujuan pembelajaran dapat juga dihasilkan melalui

proses analisis kebutuhan atau need analysis dan pengalaman-pengalaman tentang kesulitan-kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa.

- b. *Conduct Instructional Analysis* (Melakukan analisis pembelajaran/instruksional).

Analisis instruksional merupakan prosedur yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan yang diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran. Dalam melakukan analisis instruksional beberapa langkah diperlukan untuk mengidentifikasi kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap yang perlu dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran.

- c. *Analysis Learners and contex* (menganalisis warga belajar dan lingkungannya/konteks).

Pada langkah ini perlu dilakukan analisis terhadap karakteristik yang akan belajar dan konteks pembelajaran. Analisis terhadap karakteristik siswa meliputi kemampuan aktual yang dimiliki oleh siswa, gaya belajar, dan sikap terhadap aktivitas belajar. Identifikasi yang akurat tentang karakteristik siswa yang akan belajar dapat membantu perancang program pembelajaran dalam memilih dan menentukan strategi pembelajaran yang akan digunakan.

Sedangkan analisis konteks meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari siswa dan situasi yang terkait dengan tugas yang dihadapi oleh siswa untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari.

d. *Write Performance objectives* (merumuskan tujuan khusus).

Berdasarkan hasil analisis instruksional, seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran spesifik (*instructional objectives*) yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang bersifat umum (*instructional goal*). Dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang bersifat khusus, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu : a). Menentukan pengetahuan dan keterampilan yang perlu dimiliki siswa setelah menempuh proses pembelajaran; b). Kondisi yang diperlukan agar siswa dapat melakukan unjuk kemampuan dari pengetahuan yang telah dipelajari; c). Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan siswa dalam menempuh proses pembelajaran.

e. *Develop Assessments Instruments* (Mengembangkan instrumen penilaian).

Berdasarkan tujuan khusus yang dirumuskan, langkah selanjutnya adalah mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian

hasil belajar siswa. Hal ini dikenal dengan istilah evaluasi hasil belajar. Hal penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam menentukan instrumen evaluasi yang akan digunakan, adalah instrumen harus dapat mengukur performa siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan.

f. *Develop Instructional Strategy* (Mengembangkan strategi pembelajaran).

Dalam mengembangkan strategi pembelajaran, bentuk-bentuk strategi yang dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra-pembelajaran, penyajian materi pembelajaran, dan aktivitas tindak lanjut dari kegiatan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang dipilih untuk digunakan perlu didasarkan pada beberapa faktor, diantaranya : 1). Materi yang perlu dipelajari oleh siswa; 2) karakteristik siswa yang akan terlibat dalam kegiatan pembelajaran; 3) Karakteristik media pembelajaran yang akan digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran.

g. *Develop and Select Instructional Materials* (mengembangkan materi pembelajaran).

Pada tahap ini perancang program pembelajaran dapat menerapkan strategi pembelajaran yang telah dirancang dalam tahap sebelumnya kedalam bahan ajar yang akan

digunakan. Istilah bahan ajar identik dengan media pembelajaran, yaitu sesuatu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Misalnya buku teks, buku panduan, modul.

h. *Design and Conduct Formative Evaluation of Instruction*
(Merancang evaluasi formatif).

Setelah draf atau rancangan program pembelajaran selesai dikembangkan, langkah selanjutnya adalah merancang dan melaksanakan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Hasil dari proses evaluasi formatif dapat digunakan sebagai masukan untuk memperbaiki draf program. Evaluasi formatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan produk atau program pembelajaran, meliputi : a). Evaluasi perorangan. Evaluasi perorangan ini dapat dilakukan melalui kontak langsung dengan satu atau tiga orang calon pengguna program untuk memperoleh masukan tentang kerecnaan dan daya tarik program; b). Evaluasi kelompok kecil. Pada evaluasi kelompok kecil ini dilakukan dengan mengujicobakan program terhadap sekelompok kecil calon pengguna yang terdiri dari 10-15 orang siswa. Evaluasi ini untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan untuk

memperbaiki kualitas program; c). Evaluasi lapangan. Evaluasi lapangan adalah uji coba program terhadap sekelompok besar calon pengguna program sebelum program tersebut digunakan dalam situasi pembelajaran yang sesungguhnya.

i. *Revisi Instruction* (Melakukan revisi pembelajaran).

Langkah akhir dari proses desain dan pengembangan adalah melakukan revisi terhadap draf program pembelajaran. Data yang diperoleh dari evaluasi formatif dirangkum dan ditafsirkan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh program pembelajaran. Evaluasi formatif tidak hanya dilakukan pada draf program pembelajaran saja, tetapi juga terhadap aspek-aspek desain sistem pembelajaran yang digunakan dalam program, seperti analisis instruksional, karakteristik siswa. Evaluasi formatif perlu dilakukan pada semua aspek program pembelajaran dengan tujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program.

j. *Design and Conduct Summative Evaluation* (merancang evaluasi sumatif).

Evaluasi sumatif dianggap sebagai puncak dalam aktivitas model desain pembelajaran yang dikemukakan oleh

Dick dan Carey. Evaluasi sumatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Evaluasi sumatif tidak melibatkan perancang program, tetapi melibatkan penilai independen.

BAB III
MODEL PEMBELAJARAN CVCT BERBASIS MOTIVASIONAL
DALAM PEMBELAJARAN PPKn

Model CVCT berbasis motivasional merupakan model pembelajaran yang menggabungkan model *contextual* dan VCT (Value Clarification Technique), dimana dalam pelaksanaan pembelajarannya didasarkan pada motivasi peserta didik yang mengacu pada ARCS (Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction).

A. Model Pembelajaran CVCT (*Contextual dan Value Clarification Technique*)

1. Model Pembelajaran Kontekstual

Kata *contextual* berasal dari kata *contex* yang berarti hubungan, konteks, suasana, atau keadaan. *Contextual* diartikan yang berhubungan dengan suasana (konteks). *Contextual teaching and learning* (CTL) diartikan sebagai suatu pembelajaran yang berhubungan dengan suasana tertentu (.Hosnan, 2014 : 267).

Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*) menurut Nurhadi (2003) adalah konsep belajar yang mendorong guru untuk menghubungkan antara materi yang diajarkan dan situasi dunia nyata siswa. Disamping juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam kehidupan mereka sendiri-sendiri. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksikan sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Sedangkan menurut Johnson (2006) CTL adalah sebuah prosos pendidikan yang bertujuan menolong para siswa melihat makna didalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subyek-subyek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan

pribadi, sosial dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi tujuh komponen berikut : membuat keterkaitan-keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, berpikir kritis dan kreatif untuk mencapai standar yang tinggi, dan menggunakan penilaian autentik.

Para pendidik yang menyetujui pandangan ilmu pengetahuan bahwa alam semesta itu hidup, tidak diam, dan bahwa alam semesta ditopang oleh tiga prinsip saling bergantung, diferensiasi, dan organisasi diri, harus menerapkan pandangan dan cara berpikir baru mengenai pembelajaran dan pengajaran. Menurut Johnson (2006) tiga pilar dalam sistem CTL, yaitu :

- a. CTL mencerminkan prinsip saling-ketergantungan. Saling ketergantungan mewujudkan diri, misalnya ketika para siswa bergabung untuk memecahkan masalah dan ketika para guru mengadakan pertemuan dengan rekannya. Hal ini tampak jelas ketika subyek yang berbeda dihubungkan, dan ketika kemitraan menggabungkan sekolah dengan dunia bisnis.
- b. CTL mencerminkan prinsip diferensiasi. Diferensiasi menjadi nyata ketika CTL menantang para siswa untuk saling menghormati keunikan masing-masing, untuk menghormati perbedaan-perbedaan, untuk menjadi kreatif, untuk bekerjasama, untuk

menghasilkan gagasan dan hasil baru yang berbeda, dan untuk menyadari bahwa keragaman adalah tanda kemantapan dan kekuatan.

- c. CTL mencerminkan prinsip pengorganisasian diri. Pengorganisasian diri terlihat ketika para siswa mencari dan menemukan kemampuan dan minat mereka sendiri yang berbeda, mendapatkan manfaat dari umpan balik yang diberikan oleh penilaian autentik, mengulas usaha-usaha mereka dalam tuntunan tujuan yang jelas dan standar yang tinggi, dan berperan serta dalam kegiatan- kegiatan yang berpusat pada siswa yang membuat hati mereka bernyanyi.

Landasan filosofi CTL adalah konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah, tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. Konstruktivisme berakar pada filsafat pragmatisme yang digagas oleh John Dewey pada awal abad ke 20, yaitu sebuah filosofi belajar yang menekankan pada pengembangan minat dan pengalaman siswa. Anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajari bukan hanya mengetahuinya.

Pembelajaran yang berorientasi pada target penguasaan materi saja, terbukti hanya berhasil dalam kompetensi “mengingat” jangka pendek, tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang.

Model kontekstual merupakan proses pembelajaran yang diharapkan dapat berlangsung secara alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk bekerja dan mengalami, bukan sekedar transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Dalam konteks itu siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, mereka dalam status apa dan bagaimana mencapainya. Mereka akan menyadari bahwa yang mereka pelajari berguna bagi hidupnya. Dengan demikian mereka belajar yang berguna bagi hidupnya. Mereka memposisikan dirinya yang memerlukan suatu bekal untuk hidupnya nanti. Mereka mempelajari sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya dan berupaya menggapainya. Dalam upaya itu, mereka memerlukan guru sebagai pengarah dan pembimbing. Untuk menciptakan kondisi tersebut diperlukan sebuah strategi belajar baru yang lebih memberdayakan siswa. Sebuah strategi belajar yang tidak mengharuskan siswa menghafal fakta-fakta, tetapi sebuah strategi yang mendorong siswa mengkonstruksi pengetahuan dibenak mereka sendiri. Melalui model CTL, siswa diharapkan belajar mengalami bukan menghafal.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Aqib (2013) Mengemukakan bahwa ada 5 teori yang mendasari model pembelajaran kontekstual, yaitu :

- 1). *Knowledge Based Constructivism*. Teori ini menekankan pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar.
- 2). *Effort Based Learning*. Teori ini menyatakan bahwa bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar akan memotivasi seseorang untuk terlibat dalam kegiatan yang berkaitan dengan komitmen untuk belajar.
- 3). *Socialization*. Dalam hal ini menekankan bahwa belajar merupakan proses sosial yang menentukan tujuan belajar. Oleh karena itu faktor sosial dan budaya perlu diperhatikan dalam perencanaan pengajaran.
- 4). *Situated Learning*. Dalam hal ini Pengetahuan dan pembelajaran harus dikondisikan dalam fisik tertentu dan konteks sosial (masyarakat, rumah dsb) dalam mencapai tujuan.
- 5). *Distributed Learning*. Dalam hal ini manusia merupakan bagian terintegrasi dari proses pembelajaran. Oleh karena itu harus berbagi pengetahuan dan tugas.

Pembelajaran berbasis CTL menurut Sanjaya,(2004) melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu : konstruktivisme (*konstruktivisme*), bertanya (*questioning*), menemukan (*inquiry*), masyarakat belajar (*learning community*), pemodelan (*modeling*), refleksi (*reflection*) dan penilaian sebenarnya (*authentic assessment*).

- 1). Konstruktivisme (*konstruktivisme*) adalah proses membangun dan menyusun pengetahuan baru dalam struktur kognitif siswa berdasarkan pengalaman. Menurut Konstruktivisme,

pengetahuan memang berasal dari luar tetapi dikonstruksi oleh dalam diri seseorang. Oleh sebab itu pengetahuan terbentuk oleh dua faktor penting yaitu : obyek yang menjadi bahan pengamatan dan kemampuan subyek untuk menginterpretasi obyek tersebut. Asumsi ini melandasi CTL. Pembelajaran melalui CTL pada dasarnya mendorong agar siswa bisa mengkonstruksi pengetahuannya melalui proses pengamatan dan pengalaman nyata yang dibangun oleh individu si pembelajar.

- 2). Inkuiri (*inquiry*), artinya proses pembelajaran didasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berfikir secara sistematis. Secara umum proses inkuiri dapat dilakukan melalui beberapa langkah yaitu : a) merumuskan masalah, b) mengajukan hipotesis, c) mengumpulkan data, d) menguji hipotesis, e) membuat kesimpulan. Penerapan asas inkuiri pada CTL dimulai dengan adanya masalah yang jelas yang ingin dipecahkan, dengan cara mendorong siswa untuk menemukan masalah sampai merumuskan kesimpulan. Asas menemukan dan berfikir sistematis akan dapat menumbuhkan sikap ilmiah, rasional, sebagai dasar pembentukan kreatifitas.
- 3). Bertanya (*questioning*) adalah bagian inti belajar dan menemukan pengetahuan. Dengan adanya keingintahuanlah pengetahuan selalu dapat berkembang. Dalam pembelajaran model CTL guru tidak menyampaikan informasi begitu saja tetapi memancing siswa dengan bertanya agar siswa dapat menemukan jawabannya sendiri.

- Dengan demikian pengembangan ketrampilan guru dalam bertanya sangat diperlukan. Hal ini penting karena pertanyaan guru menjadikan pembelajaran lebih produktif, yaitu berguna untuk :
- a). Menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan pelajaran;
 - b) Membangkitkan motivasi siswa untuk belajar;
 - (c). Merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu;
 - d). Memfokuskan siswa pada sesuatu yang diinginkan;
 - e). Membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sesuatu.
- 4). Masyarakat Belajar (*Learning Community*), bahwa pengetahuan dan pengalaman anak banyak dibentuk oleh komunikasi dengan orang lain. Permasalahan tidak mungkin dipecahkan sendirian, tetapi membutuhkan bantuan orang lain untuk saling membutuhkan. Dalam model CTL hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, teman, antar kelompok, sumber lain dan bukan hanya guru. Dengan demikian asas masyarakat belajar dapat diterapkan melalui belajar kelompok, dan sumber-sumber lain dari luar yang dianggap tabu tentang sesuatu yang menjadi fokus pembelajaran.
- 5). Pemodelan (*modelling*) adalah proses pembelajaran dengan memperagakan suatu contoh yang dapat ditiru oleh siswa. Sebagai contoh, membaca berita, membaca lafal bahasa, mengoperasikan instrumen memerlukan contoh agar siswa dapat mengerjakan dengan benar. Dengan demikian modelling merupakan asas penting

dalam pembelajaran melalui CTL, karena melalui CTL siswa dapat terhindar dari verbalisme atau pengetahuan yang bersifat teoritis-abstrak. Perlu juga dipahami bahwa modelling tidak terbatas dari guru saja tetapi dapat juga memanfaatkan siswa atau sumber lain yang mempunyai pengalaman atau keahlian.

- 6). Refleksi (*reflection*) adalah proses pengendapan pengalaman yang telah dipelajarinya dengan cara mengurutkan dan mengevaluasi kembali kejadian atau peristiwa pembelajaran telah dilaluinya untuk mendapatkan pemahaman yang dicapai baik yang bernilai positif atau tidak bernilai (negatif). Melalui refleksi siswa akan dapat memperbaharui pengetahuan yang telah dibentuknya serta menambah khazanah pengetahuannya.
- 7). Penilaian nyata (*authentic assesment*) adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan siswa. Penilaian ini diperlukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Penilaian ini berguna untuk mengetahui apakah pengalaman belajar mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan siswa baik intelektual, mental, maupun psikomotorik. Pembelajaran CTL lebih menekankan pada proses belajar dari pada sekedar hasil belajar oleh karena itu penilaian ini dilakukan terus menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Dalam CTL keberhasilan pembelajaran tidak hanya

ditentukan oleh perkembangan kemampuan intelektual saja, tetapi perkembangan seluruh aspek.

Menurut Sugiyanto (2009), bahwa ciri kelas yang menggunakan pendekatan kontekstual meliputi : (a) Pengalaman nyata; (b). Kerjasama, saling menunjang; (c) Gembira belajar dengan bergairah; (d). Pembelajaran terintegrasi; (e) Menggunakan berbagi sumber; (f) Siswa aktif dan kritis; (g) Menyenangkan tidak membosankan; (h). Sharing dengan teman; (i) Siswa kritis dan guru kreatif.

2. VCT (*Value Clarification Technique*)

VCT (*Value Clarification Technique*) merupakan salah satu teknik pembelajaran yang dapat memenuhi tercapainya tujuan pendidikan nilai. Djahiri (1985 : 115) menyatakan bahwa VCT (*Value Clarification Technique*) adalah sebuah cara untuk menanamkan dan menggali /mengungkapkan nilai nilai dari diri peserta didik. VCT (*Value Clarification Technique*) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang dianggap baik untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Disisi lain Adisusilo (2014 : 141) menyatakan bahwa VCT (*Value Clarification Technique*) adalah pendekatan pendidikan nilai dimana peserta didik dilatih untuk menemukan, memilih, menganalisis, memutuskan, mengambil sikap sendiri nilai-nilai hidup yang ingin

diperjuangkan. Peserta didik dibantu menjernihkan, memperjelas atau mengklarifikasi nilai-nilai hidupnya lewat *values problem solving*, diskusi, dialog, dan presentasi. VCT (*Value Clarification Technique*) menekankan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatan sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.

Hall (1973 : 11) mengartikan VCT (*Value Clarification Technique*) adalah : “*By value clarification we mean a methodology or process by which we help a person to discover values through behavior, feelings, ideas, and through important choices he has made and is continually, in fact, acting upon in and through his life* “. Melalui klarifikasi nilai, peserta didik tidak disuruh menghafal dengan nilai-nilai yang sudah diberikan dari pihak lain, melainkan dibantu untuk menemukan, menganalisis, mempertanggung jawabkan, mengembangkan, memilih, mengambil sikap dan mengamalkan nilai-nilai hidupnya sendiri.

Berdasarkan hal tersebut di atas VCT (*Value Clarification Technique*) dapat diartikan sebagai teknik pengajaran untuk membantu siswa dalam mencari dan menemukan suatu nilai yang dianggap baik untuk menghadapi suatu persoalan melalui proses menganalisis nilai yang telah ada dan tertanam dalam diri siswa.

Pendekatan VCT (*Value Clarification Technique*) ini digunakan dengan tujuan :

- a. Membantu peserta didik supaya menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain.
- b. Membantu peserta didik agar mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain, berkaitan dengan nilai-nilai yang diyakininya.
- c. Membantu peserta didik agar mampu menggunakan akal budi dan kesadaran emosionalnya untuk memahami perasaan, nilai-nilai dan pola tingkah lakunya sendiri.
- d. Mengukur atau mengetahui tingkat kesadaran peserta didik tentang suatu nilai.
- e. Membina kesadaran siswa tentang nilai-nilai yang dimilikinya baik tingkatannya maupun sifatnya (positif dan negatifnya) untuk dibina kearah peningkatan dan perbaikannya.
- f. Menanamkan nilai-nilai tertentu kepada peserta didik melalui cara yang rasional dan diterima peserta didik sehingga pada akhirnya nilai tersebut menjadi milik peserta didik.
- g. Melatih peserta didik cara menilai, menerima, dan mengambil keputusan terhadap suatu persoalan dalam hubungannya dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat (Zakiah dan Rusdiana, 2014 : 189).

VCT (*Value Clarification Technique*) sebagai pendekatan pendidikan nilai moral memiliki keunggulan diantaranya, yaitu:

- a. Mampu membina dan menanamkan nilai-nilai moral.
- b. Mampu mengklarifikasi dan mengungkapkan isi pesan materi yang disampaikan.
- c. Mampu mengklarifikasi dan menilai kualitas nilai moral diri peserta didik dan nilai moral dalam kehidupan nyata.
- d. Mampu mengundang, melibatkan, membina, dan mengembangkan potensi diri peserta didik terutama potensi afektualnya.
- e. Mampu memberikan pengalaman belajar dalam berbagai kehidupan.
- f. Mampu menangkal, meniadakan, mengintervensi, berbagai nilai moral yang ada dalam sistem nilai dan moral yang ada dalam diri seseorang.
- g. Mampu menuntun dan memotivasi untuk hidup layak dan bermoral tinggi (Djahiri dalam Zakiah, 2014 : 189).

Dalam penerapan pendekatan VCT (*Value Clarification Technique*) supaya dapat terlaksana dengan baik diperlukan sistem pendukung, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengimplematisasikan VCT dan sarana prasarana pembelajaran. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh guru dalam mengimplementasikan VCT, yaitu :

- a. Bersikap menerima dan tidak mengadili pilihan nilai peserta didik, menghindari kesan memberi nasehat, menggurui seakan-akan guru lebih tahu dan lebih baik.

- b. Membiarkan adanya keanekaragaman pandangan, dialog dilakukan secara terbuka, bebas, dan individual.
- c. Menghargai kesediaan peserta didik untuk ikut berpartisipasi atau tidak, hindari unsur pemaksaan untuk berpendapat atau bersikap.
- d. Menghargai jawaban atau respon peserta didik, tidak memaksakan peserta didik untuk memberi respon tertentu apabila memang peserta didik tidak mengkehendaknya.
- e. Mendorong peserta didik untuk menjawab, mengutarakan, pilihan dan mengambil sikap secara jujur.
- f. Mahir mendengarkan dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat mengklarifikasi nilai hidup.
- g. Mahir mengajukan dan membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kehidupan pribadi dan sosial (Harmin dalam Sinurat, 2004).

Adapun sarana-prasarana pembelajaran sebagai sistem pendukung yang harus ada antara lain :

- a. Adanya sumber belajar (bahan ajar, modul, *hand out*).
- b. Adanya media pembelajaran.
- c. Adanya nara sumber yang dapat dimanfaatkan peserta didik.
- d. Tersedianya perpustakaan yang dapat mendukung proses pembelajaran.

Menurut Hall (1982) pada intinya dalam proses pembelajaran VCT (*Value Clarification Technique*) ada tiga hal, yaitu : 1) Memilih dan menentukan nilai dengan bebas; 2). Merasa senang, bangga, bahagia, dengan pilihan nilai; dan 3). Menginternalisasikan, bersikap, dan melaksanakan atau bertingkah laku sesuai dengan nilai yang menjadi pilihannya.

Adapun penjabaran langkah-langkah proses pembelajaran dengan VCT (*Value Clarification Technique*) adalah sebagai berikut :

a. Memilih dengan bebas

Memilih nilai secara bebas berarti bebas dari segala tekanan. Nilai yang diperoleh dari paksaan atau tekanan dari pihak luar peserta didik belum dinamakan nilai yang sesungguhnya. Nilai yang sesungguhnya adalah nilai yang dipilih secara bebas.

b. Memilih dari berbagai alternatif.

Memilih secara bebas mengandalkan ada berbagai alternatif. Jika tidak ada alternatif pilihan, maka tidak ada kebebasan memilih. Ini berarti juga bahwa untuk menentukan pilihan dari beberapa alternatif pilihan secara bebas.

c. Memilih sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari masing-masing alternatif.

Memilih nilai berarti menentukan suatu nilai sesudah mempertimbangkan konsekuensi dari semua alternatif yang ada. Tidak mengetahui akibat dari suatu alternatif berarti tidak

mengetahui apa yang akan terjadi dan apa akibatnya. Jika demikian seseorang tidak bebas memilih. Sebaliknya jika seseorang mengetahui akibat-akibat dari alternatif yang ada maka dia dapat memilih dengan lebih tepat.

d. Menghargai dan senang dengan pilihan yang dibuat.

Nilai adalah sesuatu yang dianggap positif, dihargai, dihormati, dijunjung tinggi, diagungkan, dipelihara. Nilai membuat orang senang, gembira, bersyukur. Kalau menentukan pilihannya dan ternyata sesudah melakukannya itu seseorang menjadi gembira atau senang, maka seseorang menemukan nilai bagi dirinya. Tetapi jika seseorang menjadi murung, sedih karena pilihannya, maka kiranya seseorang telah keliru dalam menentukan pilihannya. Jadi kalau seseorang memilih sesuatu nilai seharusnya seseorang merasa bahagia, senang atas pilihannya, dan memelihara sebagai sesuatu yang berharga baginya.

e. Bersedia mengakui pilihan nilai di depan umum.

Jika nilai dijunjung tinggi, dihargai dan membuat orang senang dan bahagia maka orang tentu bersedia mengakui dan menyatakan kepada orang lain. Kalau orang menjunjung tinggi suatu nilai, maka orang yang bersangkutan dapat diharapkan akan mengkomunikasikan kepada orang lain.

- f. Berperilaku sesuai dengan pilihan, atau kemauan dan kemampuan untuk mencoba melaksanakannya.

Agar sesuatu benar-benar merupakan nilai bagi seseorang, maka sikap hidup, tindakan yang bersangkutan harus berdasarkan nilai-nilai itu. Sedangkan nilai-nilai itu harus diwujudkan atau tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya. Tindakan seseorang mencerminkan nilai yang dianut dan yang diyakininya. Seseorang akan bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan nilainya. Dengan demikian nilai itu memberikan arah pada hidupnya.

- g. Berulang-ulang berperilaku sesuai dengan pilihan sehingga terbentuk suatu pola hidup.

Agar sesuatu sungguh-sungguh menjadi nilai bagi seseorang, maka tindakannya dalam berbagai situasi harus sesuai dengan nilai-nilai. Seseorang bertindak berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya dan dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi pola hidupnya. Dalam tahapan ini nilai tidak saja dipahami, dimengerti, dan diyakini kebenarannya, tetapi diwujudkan dalam perbuatan atau tindakan hidup.

B. Motivasi ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*)

Metode yang dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar motivasi, yaitu bahwa setiap orang hanya mau mempelajari hal-hal yang menarik perhatiannya saja dan apa manfaatnya bagi dirinya. Model ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, Satisfaction*), dikembangkan oleh Keller dan Kopp

(1987) dikembangkan berdasarkan teori nilai harapan (*expectancy value theory*) yang mengandung dua komponen yaitu nilai (*value*) dari tujuan yang akan dicapai dan harapan (*expectancy*). Dari dua komponen tersebut oleh Keller dikembangkan menjadi empat komponen. Keempat komponen model pembelajaran itu adalah *attention*, *relevance*, *confidence* dan *satisfaction* dengan akronim ARCS (Keller dan Kopp, 1987)

a. *Attention* (perhatian)

Attention Adalah bentuk pengarahannya untuk memusatkan tenaga dan energi psikis dalam menghadapi suatu obyek. Munculnya perhatian di dorong oleh rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu seseorang ini muncul karena dirangsang melalui elemen-elemen baru, aneh, lain dengan yang sudah ada, dan kontradiktif. Peserta didik diharapkan dapat menimbulkan minat yaitu kecenderungan untuk merasa tertarik pada pelajaran atau pokok pelajaran tertentu dan merasa senang mempelajari materi itu melahirkan semangat yang baru dan dapat berperan positif dalam proses belajar mengajar selanjutnya.

b. *Relevance* (relevansi)

Relevance yaitu adanya hubungan yang ditunjukkan antara materi pembelajaran, kebutuhan dan kondisi peserta didik. Ada tiga strategi yang dapat digunakan untuk menunjukkan relevansi dalam pembelajaran, yaitu:

1. Menyampaikan tujuan yang ingin dicapai setelah mempelajari materi pembelajaran.

2. Jelaskan manfaat pengetahuan yang akan dipelajari.
3. Berikan contoh, latihan/tes yang langsung berhubungan dengan kondisi peserta didik atau profesi tertentu.

Relevansi menunjukkan adanya hubungan antara materi yang dipelajari dengan kebutuhan kondisi peserta didik. Peserta didik akan termotivasi bila mereka merasa bahwa apa yang akan dipelajari memenuhi kebutuhan pribadi atau bermanfaat bagi mereka.

c. *Confidence* (kepercayaan diri)

Confidence yaitu merasa diri kompeten atau mampu merupakan potensi untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan. Motivasi akan meningkat sejalan dengan meningkatnya harapan untuk berhasil.

Ada sejumlah strategi untuk meningkatkan kepercayaan diri, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan harapan peserta didik untuk berhasil dengan memperbanyak pengalaman.
2. Menyusun pembelajaran menjadi bagian yang lebih kecil, sehingga peserta didik tidak diuntut mempelajari banyak konsep sekaligus.
3. Meningkatkan harapan untuk berhasil dengan menggunakan persyaratan untuk berhasil.
4. Menggunakan strategi yang memungkinkan kontrol keberhasilan di tangan peserta didik.

5. Tumbuh kembangkan kepercayaan diri peserta didik dengan pernyataan-pernyataan yang membangun.
6. Berikan umpan balik konstruktif selama pembelajaran, agar peserta didik mengetahui sejauh mana pemahaman dan prestasi belajar mereka.

d. *Satisfaction* (kepuasan)

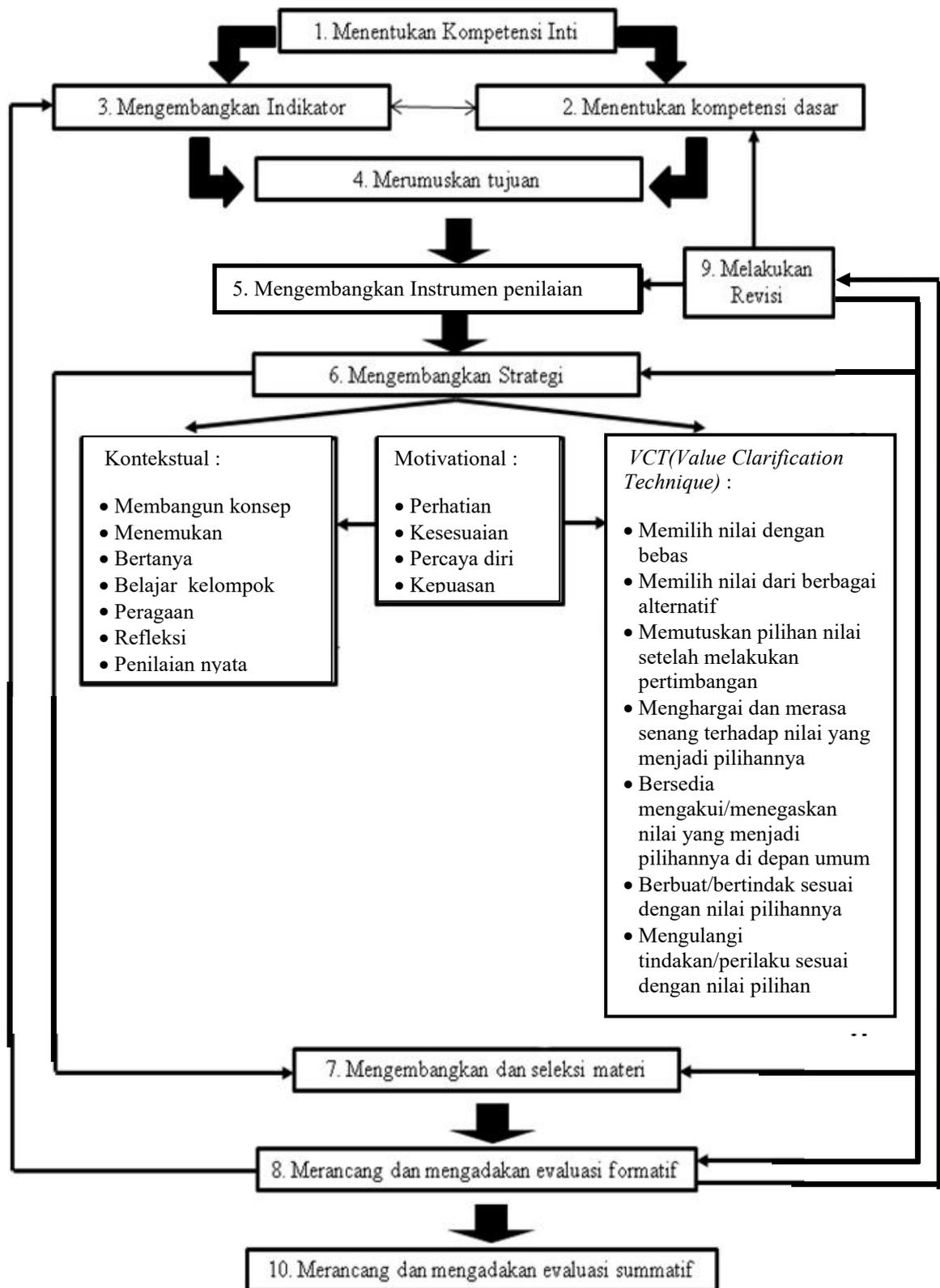
Satisfaction adalah perasaan gembira, perasaan ini dapat positif yaitu timbul kalau orang mendapatkan penghargaan dalam dirinya. Perasaan ini meningkat kepada perasaan harga diri kelak, membangkitkan semangat belajar diantaranya dengan:

1. Mengucapkan baik, bagus dan memberikan senyum bila peserta didik menjawab atau mengajukan pertanyaan.
2. Menunjukkan sikap non verbal positif pada saat menanggapi pertanyaan atau jawaban peserta didik.
3. Memuji dan memberi dorongan dengan senyuman, anggukan dan pandangan yang simpatik atas prestasi peserta didik.
4. Memberi tuntunan pada peserta didik agar dapat memberi jawaban yang benar.
5. Memberi pengarahan sederhana agar peserta didik memberi jawaban yang benar.

C. Desain Model CVCT Berbasis Motivasional

Desain model CVCT berbasis motivasional disesuaikan dengan tuntutan kurikulum 2013, yakni pembelajaran yang berpusat pada siswa (Student Center Learning) yang dikenal dengan pendekatan *saintifik*. Hal-hal yang harus disiapkan dalam pembelajaran model CVCT adalah :

1. Merancang perencanaan pembelajaran dengan mengidentifikasi rambu-rambu penyusunan RPP.
2. Mengidentifikasi Kompetensi Inti (KI), Kompetensi dasar (KD) sesuai silabus.
3. Merancang pelaksanaan pembelajaran model CVCT yang menghasilkan peningkatan internalisasi nilai-nilai Pancasila.
4. Merancang penilaian, baik penilaian proses dan hasil.



Gambar 2 : Bagan Pengembangan Hipotetik model CVCT Berbasis motivasional.

Desain pembelajaran model CVCT berbasis motivasional pada gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Menentukan Kompetensi Inti (KI) dalam pembelajaran PPKn.

Sebelum menentukan Kompetensi Inti (KI) dalam model CVCT ini dilakukan observasi di sekolah dan wawancara terhadap guru dan peserta didik. Berdasarkan data yang diperoleh dari observasi dan wawancara dapat disimpulkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak bagi guru dan peserta didik untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif. Adapun kompetensi inti ada empat yakni :

- a. KI-1 : Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- b. KI-2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsip dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.
- c. KI-3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah.

d. KI-4 : Mengolah, menalar, menyaji dan mencipta dalam ranah kongkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.

2. Menentukan Kompetensi Dasar (KD) dalam pembelajaran PPKn.

Pada tahap ini ditentukan Kompetensi dasar (KD) yang didasarkan pada Kompetensi Inti (KI). Adapun kompetensi dasar yang dipilih adalah sebagai berikut :

- a. Menghayati perilaku yang sesuai dengan prinsip-prinsip solidaritas yang dilandasi ajaran agama dan kepercayaan yang dianutnya (KD 1 dari KI 1).
- b. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 2).
- c. Menganalisis Kasus-kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 3).
- d. Menyajikan hasil analisis kasus pelanggaran HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (KD 1 dari KI 4).

3. Mengembangkan indikator dalam pembelajaran PPKn.

Indikator dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Indikator dalam hal ini merupakan ukuran yang akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan tingkat keberhasilan. Sebelum dikembangkan indikator pada tahap ini dilakukan identifikasi perilaku, karakteristik dan kemampuan awal peserta didik sebelum model CVCT digunakan. Identifikasi ini dilakukan untuk mengetahui perilaku, karakteristik dan kemampuan awal yang telah atau belum dikuasai peserta didik.

Adapun indikator yang dikembangkan sebagai berikut :

- a. Menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 1).
- b. Menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 1).
- c. Menghayati upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 1).
- d. Melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM (Indikator dari KD 1 KI 2).
- e. Melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 2)
- f. Melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 2).
- g. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 3).

- h. Memahami upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 3).
 - i. Memahami upaya-upaya penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 3).
 - j. Menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM (Indikator dari KD 1 KI 4).
 - k. Menunjukkan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM (Indikator dari KD 1 KI 4).
 - l. Menunjukkan contoh-contoh penegakan HAM (Indikator dari KD 1 KI 4).
4. Merumuskan tujuan khusus model pembelajaran CVCT dalam pembelajaran PPKn yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap spiritual dan sikap sosial. Melalui model CVCT siswa dapat :
- a. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia.
 - a. Memahami upaya-upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - b. Memahami upaya-upaya penegakan HAM yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
 - c. Menyajikan contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia.
 - d. Menunjukkan contoh-contoh perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan pemerintah dan masyarakat.
 - e. Menunjukkan contoh-contoh penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.

- f. Menghayati berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat Indonesia.
 - g. Menghayati upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - h. Menghayati upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
 - i. Melakukan tindakan yang tidak melanggar HAM dalam kehidupan, bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
 - j. Melakukan tindakan yang menunjukkan perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.
 - k. Melakukan tindakan yang membantu upaya penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Mengembangkan instrumen penilaian model pembelajaran CVCT dalam pembelajaran PPKn.

Instrumen penilaian berfungsi untuk mengetahui tingkat keberhasilan atau ketercapaian tujuan yang telah ditetapkan. Instrumen yang dikembangkan dalam pembelajaran model CVCT pada pembelajaran PPKn meliputi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penilaian pengetahuan menggunakan tes objektif. Penilaian sikap dan keterampilan menggunakan skala sikap.

6. Mengembangkan model, strategi dan metode pembelajaran model CVCT dalam pembelajaran PPKn.

Strategi pembelajarannya mengacu pembelajaran konstruktivisme dengan pendekatan *student center learning*. Model pembelajarannya menggunakan model CVCT berbasis motivasional yang merupakan penggabungan antara model *contextual* dengan pendekatan VCT (*Value Clarification Technique*) yang didasarkan pada motivasi peserta didik yang mengacu pada motivasi ARCS (*Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction*). Adapun metode yang akan digunakan adalah metode observasi, tanya jawab, diskusi, modeling, tugas, dialog, curah pendapat (*brain storming*), dan bermain peran.

7. Mengembangkan materi pembelajaran PPKn.

Materi yang dikembangkan adalah materi pembelajaran PPKn Sekolah menengah Kejuruan kelas XI pada semester genap yang sesuai dengan kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator dan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun materinya sebagai berikut :

- a. Berbagai permasalahan tentang pelanggaran HAM.
- b. Upaya perlindungan, pemajuan dan pemenuhan HAM.
- c. Upaya penegakan HAM.

8. Merancang dan mengadakan evaluasi formatif yang akan digunakan dalam model CVCT berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn.

Evaluasi foramatif ini akan dilakuka pada setiap akhir kegiatan pembelajaran. Evaluasi formatif ini berbentuk satu-satu, kelompok kecil dan evaluasi lapangan. Tujuan evaluasi ini untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kekuatan dan kelemahan program. Evaluasi

untuk mengetahui tingkat ketercapaian indikator dan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Ada dua alat penilaian yang digunakan, yakni tes dan non tes.

9. Melakukan revisi model pembelajaran CVCT berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn.

Revisi model merupakan langkah terakhir dari proses desain model pembelajaran CVCT berbasis motivasional. Revisi model dilakukan berdasarkan rekomendasi dari evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan terhadap langkah-langkah atau komponen model pembelajaran CVCT berbasis motivasional setelah diuji cobakan. Evaluasi formatif dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekurangan dan kelemahan konsep model beserta komponen-komponennya. Jika telah dilakukan revisi maka model tersebut telah dianggap selesai atau final sebagai produk model pembelajaran CVCT berbasis motivasional pada mata pelajaran PPKn siswa Sekolah Menengah Kejuruan.

10. Merancang dan mengadakan evaluasi sumatif pada model CVCT berbasis motivasional dalam pembelajaran PPKn.

Evaluasi sumatif merupakan kegiatan penilaian yang dilaksanakan pada akhir uji coba model pembelajaran. Setelah langkah-langkah pengembangan model CVCT berbasis motivasional yang diawali dari pengajuan draf model, uji validasi, revisi, uji coba terbatas dan uji coba diperluas serta uji keefektifan selesai dilakukan

maka baru dilakukan evaluasi sumatif. Evaluasi ini tidak melibatkan perancang model. Evaluasi sumatif dilakukan oleh orang independen. Evaluasi sumatif merupakan evaluasi terhadap model yang dikembangkan yang dilakukan dalam satu paket uji coba. Secara umum evaluasi sumatif bertujuan untuk mengetahui tingkat keefektifan model yang dikembangkan.

**SINTAKS MODEL *CVCT* BERBASIS MOTIVASIONAL
(Peneliti)**

No	Komponen	Langkah	Motivasi (ARCS)	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa
1		Apersepsi	Menciptakan perhatian siswa dan Menciptakan minat siswa untuk belajar (<i>attention/perhatian</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menyampaikan indikator, tujuan dan motivasi - Guru meminta siswa memilih nilai dengan bebas berkaitan dengan nilai Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> - Memperhatikan indikator, tujuan yang disampaikan guru dan merespon motivasi • Memilih nilai dengan bebas
2	Membangun konsep	Mengamati	Menciptakan kepercayaan diri siswa dan kesesuaian (<i>confidence/percaya diri dan relevation/kesesuaian</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menjelaskan tugas yang harus dikerjakan siswa - Guru meminta siswa memilih nilai dari berbagai alternatif yang berkaitan dengan nilai pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> - Membaca buku teks dan melakukan pengamatan • Memilih nilai dari berbagai alternatif
3	Menemukan	<ul style="list-style-type: none"> - Mengamati - Menanya - Mengumpulkan data 	Mengkaitkan dengan kebutuhan, dan lingkungan siswa (<i>relevation/kesesuaian</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menayangkan suatu peristiwa - Guru menugaskan siswa untuk mengamati tayangan dan lingkungan sekitar - Guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pengamatan - Bertanya dan menjawab pertanyaan guru • Memutuskan pilihan nilai setelah melakukan pertimbangan

				meminta siswa memutuskan pilihan nilai Pancasila setelah melakukan pertimbangan.	
4	Bertanya	Menanya	Menciptakan kepercayaan diri siswa dan mewujudkan kepuasan siswa. (<i>Confidence/kepercayaan diri dan satisfaction/kepuasan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru memberi kesempatan siswa untuk bertanya kepada guru dan guru bertanya kepada siswa - Guru meminta siswa menghargai terhadap nilai yang menjadi pilihannya terkait dengan nilai Pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> - Menjawab pertanyaan guru dan bertanya kepada guru • Menghargai dan merasa senang terhadap nilai yang menjadi pilihannya
5	Belajar Kelompok	Diskusi kelompok	Menciptakan kepercayaan diri siswa dan mewujudkan kepuasan siswa. (<i>Confidence/kepercayaan diri dan satisfaction/kepuasan</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menjelaskan tata cara berdiskusi dan menentukan tema - Guru meminta siswa Bersedia mengakui nilai yang menjadi pilihannya di depan umum terkait dengan 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa melakukan diskusi • Bersedia mengakui/mengatakan nilai yang menjadi pilihannya di depan umum

				nilai Pancasila	
6	Peragaan	Mengkominikasikan	Menciptakan kepercayaan diri siswa dan mewujudkan kepuasan siswa. (<i>Confidence</i> /kepercayaan diri dan <i>satisfaction</i> /kepuasan)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menjelaskan tata cara presentase yang baik, dan guru meminta siswa untuk presentasi - Guru meminta siswa melakukan tindakan yang sesuai dengan pilihannya terkait dengan nilai pancasila 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa melakukan presentasi dalam kelompok atau kelas • Berbuat/bertindak sesuai dengan nilai pilihannya
7	Refleksi	Mengasosiasikan	Menciptakan kesesuaian (<i>relevance</i>) dan kepuasan (<i>satisfaction</i>)	<ul style="list-style-type: none"> - Guru menugaskan kepada siswa untuk mengkaitkan materi yang dipelajari dengan kehidupan nyata - Guru meminta siswa untuk merenungkan berbagai kejadian yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari - Guru meminta siswa mengulangi 	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa melakukan perenungan dan menyampaikan hasil perenungan • Mengulangi tindakan /perilaku sesuai dengan nilai pilihan

				tindakannya terkait dengan nilai Pancasila	
8	Penilaian nyata	Penilaian dan Penutup	Menciptakan kepercayaan diri (<i>confidence</i>) dan kepuasan (<i>satisfaction</i>)	- Guru melakukan penilaian akhir pembelajaran	- Siswa mengerjakan tes
				-	-

BAB IV

KONSEP PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memberikan kontribusi pendidikan untuk pembangunan karakteristik guna membentuk seorang warga negara yang memahami dan menghayati nilai-nilai pancasila. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah / negara untuk mendidik dan mengembangkan karakter warganegaranya agar sesuai dengan ideologi serta politik bangsanya yang didasarkan nilai-nilai pancasila . Hal ini dilakukan melalui pendidikan formal untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa menjadi warga negara yang baik.

Secara garis besar terdapat grand teori yang membangun rumpun keilmuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu: Ilmu Hukum, Politik dan Filsafat Moral. Dengan demikian sejak awal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner termasuk didalamnya aspek kependidikan. Secara akademik Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki visi sebagai *nation character building*.

B. Tujuan dan Ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan peran dari warga negara yang berkaitan dengan masalah pendidikan kebangsaan yang digarap melalui pengembangan dan pemenuhan hak – hak warga negara secara berkeadilan. Hal ini dilakukan dengan proses

pembelajaran yang relevan dengan kerangka keilmuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan

Menurut Winarno (2006: 29-30) Ruang lingkup mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Persatuan dan Kesatuan Bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.
2. Norma, Hukum dan Peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di satuan pendidikan nonformal penyelenggara pendidikan kesetaraan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak Asasi Manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional HAM, pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan Warga Negara, meliputi: hidup gotong-royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.

5. Konstitusi Negara, meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi.
6. Kekuasaan dan Politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahan daerah dan otonomi, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.
7. Pancasila, meliputi: kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi, meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri Indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional, dan mengevaluasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ruang lingkup pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini merupakan suatu pembahasan secara formal dan material untuk mencapai sasaran berkaitan dengan warganegara yang baik, meliputi wawasan, sikap, dan perilaku warganegara dalam kesatuan bangsa dan negara.

C....Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada jenjang pendidikan menengah adalah keseluruhan program kurikuler sebagai upaya mendidik peserta didik menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan Pembelajaran Berbuat (*action learning*

approach) menekankan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok. Superka, et. al (1976: 13) menyimpulkan ada dua tujuan pendidikan moral berdasarkan kepada pendekatan ini. Pertama, memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama, berdasarkan nilai-nilai mereka sendiri. Kedua, mendorong siswa untuk melihat diri mereka sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam pergaulan dengan sesama, yang tidak memiliki kebebasan sepenuhnya, melainkan sebagai warga dari suatu masyarakat, yang harus mengambil bagian dalam suatu proses demokrasi.

Metode-metode pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan analisis nilai dan klarifikasi nilai digunakan juga dalam pendekatan ini. Metode-metode lain yang digunakan juga projek-projek tertentu untuk dilakukan di sekolah atau dalam masyarakat, dan praktek keterampilan dalam berorganisasi atau berhubungan antara sesama (Superka, et. al. 1976: 34). Menurut Elias (1989) pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newman, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa dalam melakukan perubahan-perubahan sosial. Menurut Elias (1989: 42), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan “ *moral reasoning* ” dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis. Penganjur pendekatan ini memandang bahwa kelemahan dari berbagai pendekatan lain adalah menghasilkan warga Negara yang pasif. Menurut mereka, melalui program-

program pendidikan moral sepatutnya menghasilkan warga negara yang aktif, yakni warga negara yang memiliki kompetensi yang diperlukan dalam lingkungan hidupnya (*environmental competence*), yaitu :

1. Kompetensi fisik (*physical competence*), yang dapat memberikan nilai tertentu terhadap suatu obyek, misalnya :melukis sesuatu, membangun sebuah rumah, dan sebagainya
2. Kompetensi hubungan antarpribadi (*interpersonal competence*), yang dapat memberikan pengaruh kepada orang-orang melalui hubungan antara sesama, misalnya : saling memperhatikan, persahabatan, hubungan ekonomi, dan lain-lain:
3. Kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) yang dapat memberi pengaruh kepada urusan-urusan masyarakat umum, misalnya: proses pemilihan umum dengan memberi bantuan kepada seorang calon atau partai peserta untuk memperoleh kemenangan, atau melalui kelompok peminat tertentu, mampu mempengaruhi perubahan kebijaksanaan umum.(Elias, 1986: 45)

Diantara ketiga kompetensi tersebut, kompetensi yang ketiga (*civic competence*) merupakan kompetensi yang paling penting. (Hersh, et. al 1980). Kompetensi ini ingin dikembangkan melalui program-program pendidikan formal.

Dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak hanya tataran aspek kognitif saja, tetapi harus menyentuh pada ranah afektif dan psikomotorik. Oleh karena itu berbagai pendekatan pembelajaran harus

memberikan kesempatan kepada siswa untuk berpartisipasi secara aktif. Kegiatan pembelajaran harus memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik serta peserta didik dengan guru, lingkungan dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi dasar. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai oleh peserta didik.

BAB V

INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

A. Hakikat Internalisasi Nilai

Secara etimologis internalisasi dapat diartikan sebagai proses penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan dan bimbingan (Peter dan Yeni, 2002 : 336). Jika internalisasi bisa dilakukan melalui proses pembinaan dan bimbingan, maka peran pendidikan nilai sangat penting.

Pendidikan nilai merupakan proses bimbingan melalui suri teladan yang berorientasi pada penanaman nilai-nilai kehidupan yang di dalamnya mencakup nilai-nilai agama, budaya, etika, dan estetika menuju pembentukan peserta didik yang memiliki kecerdasan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian yang utuh, berakhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara (Sumantri dalam Zakiah, 2014 : 199). Pendidikan nilai juga bisa diartikan sebagai bantuan kepada peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya, Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, tetapi mencakup pula keseluruhan proses pendidikan.

Lickona (1992) menyatakan, bahwa pendidikan nilai akan menghasilkan karakter. Dimana ada tiga komponen karakter yang baik, yakni pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang

mental (*moral feeling*), dan perbuatan moral (*moral action*). Ketiga komponen tersebut menunjuk pada tahapan pemahaman sampai pelaksanaan nilai dalam kehidupan sehari-hari. Ketiganya tidak serta merta terjadi pada diri seseorang, melainkan bersifat prosedural. Artinya tahapan ketiga hanya mungkin terjadi setelah tercapai tahap kedua, dan tahap kedua hanya tercapai setelah tahapan pertama.

Dalam banyak hal kasus ketiga tahapan tidak terjadi secara utuh. Mungkin ada orang hanya sampai *moral knowing* dan berhenti sebatas memahami. Orang lain sampai pada tahap *moral feeling*, dan yang lain mengalami perkembangan dari *moral knowing* sampai *moral action*. *Moral knowing* adalah merupakan hal yang penting untuk diajarkan. *Moral knowing* terdiri dari enam hal, yaitu : 1). *Moral awareness* (kesadaran moral); 2). *Knowing moral value*(mengetahui nilai-nilai moral); 3). *Perspective taking*; 4). *Moral reasoning*; 5). *Decision making*; 6). *Self knowledge*.

Pendidikan nilai hanya sampai pada *moral knowing* tidaklah cukup, sebab sebatas pada tahu atau memahami tanpa mengamalkannya. Hal ini hanya akan menghasilkan orang-orang cerdas tetapi tidak bermoral. Maka amatlah penting pendidikan untuk dilanjutkan sampai pada *moral feeling*. *Moral feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik yang merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Ada enam hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia

yang bermoral, yaitu : *conscience* (nurani), *self esteem* (percaya diri), *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), *loving the good* (mencintai kebenaran), *self control* (mampu mengontrol diri), dan *humility* (kerendahan hati).

Langkah yang amat penting dalam pendidikan nilai adalah *moral action*. Moral action adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Tindakan moral ini merupakan hasil (*outcome*) dari dua komponen moral lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat dari tiga aspek lain, yaitu *competence* (kompetensi), *will* (keinginan), dan *habit* (kebiasaan).

Nilai secara etimologis berasal dari kata *Value* (Mustari Mustofa, 2011 : 15). Dalam kehidupan sehari-hari nilai merupakan sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna bagi manusia. Kartono Kartini dan Dall Guno (2003 : 20) menyatakan bahwa nilai merupakan hal yang dianggap penting dan baik. Nilai merupakan preferensi yang tercermin dari perilaku seseorang sehingga seseorang akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu tergantung dari sistem nilai yang dipegangnya.

Linda dan Richard Eyre (1997) menyatakan bahwa nilai adalah standar –standar perbuatan dan sikap yang menentukan siapa kita, bagaimana kita hidup, dan bagaimana kita memperlakukan orang lain.

Tentu saja nilai-nilai yang baik yang bisa menjadikan orang lebih baik, hidup lebih baik, dan memperlakukan orang lain secara lebih baik. Nilai tidak selalu sama bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena dalam masyarakat sering terdapat kelompok yang berbeda-beda. Dimana masing-masing kelompok memiliki sistem nilai sendiri-sendiri. Maka jika terjadi konflik metode dialog merupakan solusi yang terbaik.

Hill (1991) berpendapat bahwa nilai sebagai acuan tingkah laku hidup manusia mempunyai tiga tahapan, yaitu : 1). *Values thinking*, yaitu nilai-nilai pada tahapan dipikirkan atau *values cognitive*; 2). *Values affective*, yaitu nilai-nilai yang menjadi keyakinan atau niat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Pada tahap *values affective* meliputi *disposition* dan *commitments*; 3) *Values actions*, yaitu tahap dimana nilai yang sudah menjadi keyakinan dan menjadi niat yang kuat diwujudkan menjadi suatu tindakan nyata atau perbuatan kongkrit.

Muhaimin (2002 : 153) menyatakan bahwa proses internalisasi yang berkaitan dengan pembinaan peserta didik, ada tiga tahap, yaitu :

1. Tahap transformasi nilai. Tahap ini merupakan tahap penyampaian informasi nilai-nilai kepada peserta didik secara verbal.
2. Tahap transaksi nilai. Pada tahap ini dilakukan komunikasi dua arah antara guru dengan peserta didik.

3. Tahap transinternalisasi nilai. Pada tahap ini merupakan tahapan yang paling tinggi, dimana guru dituntut melakukan komunikasi secara utuh sampai pada tataran penghayatan dan penjiwaan nilai.

Menurut Notonagoro (1974), bahwa realisasi nilai-nilai Pancasila, perlu secara berangsur-angsur diwujudkan melalui pendidikan baik di keluarga, sekolah maupun dalam masyarakat, sehingga diperoleh hal-hal sebagai berikut:

1. **Pengetahuan**, yaitu sedapat mungkin lengkap yaitu meliputi pengamalan biasa, pengetahuan ilmiah, dan pengetahuan filsafat tentang Pancasila. Hal ini sangat penting terutama bagi para calon pemimpin bangsa dan calon ilmuwan. Dalam proses transformasi pengetahuan ini diperlukan waktu yang cukup lama dan berkesinambungan, sehingga pengetahuan itu benar-benar dapat tertanam dalam setiap individu. Tanpa pendidikan yang cukup maka dapat dipastikan bahwa pemahaman tentang ideologi bangsa dan dasar filsafat negara hanya dalam tingkat-tingkat yang sangat pragmatis, dan hal ini sangat berbahaya terhadap ketahanan ideologi generasi penerus bangsa.
2. **Kesadaran**. Setelah seseorang mempunyai pengetahuan tentang Pancasila, maka seseorang harus mempunyai kesadaran akan apa yang akan dilakukan. Kesadaran merupakan sikap selalu mengetahui pertumbuhan keadaan yang ada dalam diri sendiri.

Kesadaran seseorang menjadi pijakan untuk melakukan instropeksi terhadap dirinya sendiri. Jika seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sebagai warga negara, maka akan muncul ketaatan terhadap bangsa dan negaranya.

3. Ketaatan, yaitu selalu dalam keadaan sedia untuk memenuhi wajib lahir dan batin, lahir berasal dari luar misalnya pemerintah, batin dari diri sendiri. Ketaatan merupakan tingkatan yang ketiga dalam proses internalisasi nilai-nilai Pancasila. Jika seseorang sudah memiliki pengetahuan tentang Pancasila dengan benar dan memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka dalam diri seorang akan muncul ketaatan terhadap pengamalan nilai-nilai Pancasila.

4. Kemampuan kehendak, yaitu keinginan mendasar dan mendalam yang cukup kuat sebagai pendorong untuk melakukan perbuatan. Jika seseorang sudah mempunyai kemampuan kehendak yang kuat untuk melakukan perbuatan, berarti motivasinya internalnya cukup bagus. Hal ini akan memudahkan pemahaman, penghayatan dan penjiwaan nilai-nilai Pancasila yang akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku.

5. Watak dan hati nurani agar orang selalu mawas diri, yaitu :

- a. Dengan menilai diri sendiri apakah dirinya berbuat baik atau buruk dalam melaksanakan Pancasila dan memberi sanksi batin

yang berujud pujian atau celaan kepada diri sendiri, atau sebelum melakukan perbuatan membuat pedoman Pancasila berupa perintah, larangan, anjuran atau membiarkan untuk berbuat/ tidak berbuat yang ditaatinya sendiri juga. Apabila tidak mentaati maka harus memberi sanksi batin berupa celaan terhadap diri sendiri.

- b. Apabila telah melaksanakan maka akan diperoleh suatu kesiapan pribadi untuk mengamalkan Pancasila, yang selanjutnya akan merupakan suatu keyakinan tentang kebenaran.
- c. Dengan demikian akan memiliki suatu ketahanan ideologi, sehingga dirinya akan merupakan sumber kemampuan, untuk memelihara, mengembangkan, mengamalkan, mewariskan, merealisasikan pancasila dalam segala aspek kehidupan
- d. Jika setiap orang Indonesia telah memiliki kondisi yang demikian keadaannya maka setiap orang Indonesia akan berkepribadian, berwatak dan berhati nurani Pancasila sehingga akan terjelmalah negara dan masyarakat Pancasila.

Agar realisasi itu menjadi perbuatan dalam bentuk tindakan-tindakan yang tepat, maka harus dipikirkan dan dipelajari bentuk-bentuk pengamalan yang sesuai diberbagai bidang serta lingkungan. Pada dasarnya ada dua bentuk realisasinya yaitu bersifat statis dan yang bersifat dinamis. Statis dalam pengertian intinya, yaitu nilai-nilai yang abstrak umum universal karena sifatnya yang tetap dan tidak berubah. Bersifat

dinamis dalam artian bahwa pengamalannya harus senantiasa menyesuaikan dengan perubahan, pertumbuhan dan perbedaan, tanpa meninggalkan persatuan dan kesatuan nasional.

B. Pengamalan Pancasila

1. Keharusan Moral Untuk Mengamalkan Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia mengandung konsekuensi setiap aspek penyelenggaraan negara dan semua sikap dan tingkah laku bangsa Indonesia dalam bermasyarakat dan bernegara harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai pancasila yang bersumber pada hakikat pancasila adalah bersifat abstrak umum universal, tetap dan tidak berubah. Nilai-nilai tersebut perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi norma-norma kenegaraan maupun norma-norma moral yang harus dilaksanakan dan diamalkan oleh setiap warga negara Indonesia.

Oleh karena itu, permasalahan pokok dalam pengamalan Pancasila adalah sebagaimana wujud pengamalan itu, yaitu bagaimana nilai-nilai Pancasila yang umum universal tersebut dijabarkan dalam bentuk norma-norma yang jelas dalam kaitannya dengan tingkah laku semua warga dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dalam kaitannya dengan segala aspek penyelenggaraan negara.

Selain itu dalam pengamalan Pancasila ini diperlukan juga suatu kondisi yang dapat menunjang terlaksanannya pengamalan Pancasila tersebut, baik dalam kondisi yang berkaitan dengan sikap setiap warga negara Indonesia dan wujud realisasi nilai-nilai Pancasila. Maka perlu

disadari oleh setiap warga negara Indonesia bahwa dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara setiap warga negara memiliki sifat kodrat manusia bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu sekaligus sebagai makhluk sosial. Kesepakatan kita sebagai suatu kesepakatan yang luhur untuk mendirikan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila mengandung konsekuensi bahwa kita harus merealisasikan Pancasila itu dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan setiap sikap tingkah laku kita dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan lain perkataan bagi bangsa Indonesia mengamalkan Pancasila adalah merupakan suatu keharusan.

Di samping itu dalam pengamalan Pancasila juga didasarkan pada dorongan lahir dan batin sebagai berikut:

- a. Bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia dijiwai oleh hasrat sedalam-dalamnya untuk mendirikan negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan perjuangan yang berdasarkan pada hak kodrat maka harus diwujudkan kemerdekaan Indonesia, dan melanjutkan dalam suatu negara yang bersatu berdaulat adil dan makmur berdasarkan idiologi Pancasila.
- b. Pancasila adalah landasan ideal dalam perjuangan melawan penjajah. Selain Pancasila juga merupakan asas kerokhanian negara Indonesia, baik dalam rangka tujuan-tujuan nasioanal maupun internasional.

- c. Bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan negara Indonesia pada hakikatnya berdasarkan atas suatu hukum dasar negara yang mengandung suasana kebatinan dan cita-cita hukum. Hal ini berarti mewajibkan kepada penyelenggaraan negara, pemimpin pemerintah dan pemimpin rakyat untuk memiliki semangat yang dinamis guna memelihara budipekerti kemanusiaan yang luhur untuk merealisasikan suasana dan cita-cita hukum yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang berintikan asas kerokhaniaan Pancasila.
- d. Bagi setiap warga negara Indonesia seharusnya mendasarkan cipta, rasa karsa dan karya atas nilai-nilai Pancasila. Pada hakikatnya memiliki pengetahuan saja bagi setiap warga negara Indonesia belum cukup. Oleh karena itu yang terpenting bagi kita adalah mengetahui, kemudian meresapi, menghayati, dan akhirnya mengamalkan Pancasila dalam setiap aspek penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat. Pengamalan Pancasila dapat dibedakan atas dua macam yaitu, pengamalan Pancasila Subjektif yaitu realisasi pada setiap individu, dan pengamalan Objektif yaitu realisasi dalam segala aspek kenegaraan dan hukum (Bambang Daroeso dan Suyahmo, 1989).

2. Ketaatan Moral Untuk Melaksanakan Pancasila

Kondisi yang diperlukan dalam mengamalkan Pancasila selain pendorong lahir batin masih terdapat suatu kondisi yang sangat diperlukan yaitu kesadaran akan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Rasa wajib yang telah tertanam dalam diri manusia Indonesia dan meresap dalam hati

sanubari sebagai suatu kesadaran, sehingga setiap manusia Indonesia dalam keadaan bersedia untuk melaksanakan Pancasila.

Prinsip ketaatan ini pada hakikatnya bersumber pada hakikat adil. Hakikat adil adalah dipenuhinya segala sesuatu hak dalam hidup bersama (dalam negara) sebagai sifat hubungan antara satu dengan yang lainnya, yang mengakibatkan bahwa memenuhi hak dalam hubungan antara satu dan lainnya adalah suatu wajib.

Pancasila adalah dasar filsafat negara Indonesia, maka diantara negara dengan warganya terdapat hubungan hak dan kewajiban. Warga negara adalah sebagai pendukung hak dan kewajiban dan sebagaimana diketahui bahwa untuk masalah sekarang ini yang diutamakan adalah masalah wajib. Dalam merealisasikan kewajiban distributif, yaitu tentang segala sesuatu yang termasuk kewajiban, kekuasaan, dan lingkungan negara. Sebaliknya sebagai perimbangannya setiap warga neragara wajib taat tentang segala sesuatu yang telah disepakati dalam hidup bersama dalam suatu negara, yaitu ketaatan untuk melaksanakan Pancasila. Oleh karena itu wajib taat pada hakikatnya bersifat, karena bersumber pada hakikat sifat kodrat manusia, sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Setiap warga negara Indonesia telah merealisasikan suatu perjanjian yang luhur, bahwa dalam negara sebagai suatu organisasi hidup bersama menentukan suatu perlindungan bersama, menentukan cita-cita bersama. Dengan demikian pelaksanaannya terdapat suatu pendukung kekuasaan negara yang

berkewajiban menyelenggarakan tugasnya dalam melakukan organisasi hidup bersama, yakni diperlukan adanya suatu ketaatan.

Berdasarkan pada kodrat manusia, maka dapat dipahami bahwa ketaatan adalah merupakan syarat mutlak berlangsungnya negara. Oleh karena itu perlu adanya suatu jaminan hukum. Namun demikian selain itu harus ada pula suatu jaminan ketaatan berdasarkan suatu kesadaran dan moral yang luhur. Oleh karena itu pada hakikatnya terdapat beberapa macam ketaatan kenegaraan yang dapat dirinci sebagai berikut:

a. Ketaatan hukum, terdapat dalam psal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya “ *segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* ”.

Hal ini berdasarkan pada prinsip keadilan legal (keadilan bertaat), sebagaimana telah dibahas terdapat tiga macam keadilan yang meliputi :

- 1) keadilan distributif yaitu hubungan negara terhadap warga negara, 2) keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu hubungan warga negara terhadap negara, dan 3) keadilan komutatif, yaitu hubungan antara sesama warga negara.

b. Ketaatan moral(kesusilaan), yang tersimpul dalam sila kedua Pancasila yaitu ‘Kemanusiaan yang adil dan beradab’. Selain itu terdapat juga dalam kalimat pertama pembukaan UUD 1945, bahwa hak segala bangsa atas kemerdekaan adalah merupakan hakmoral dari setiap bangsa.

c. Ketaatan religius, yaitu berdasarkan pada :

- 1). Sila pertama Pancasila, yaitu ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang bunyinya “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- 2). “Atas berkat rakhmat Allah yang Mahakuasa”, sebagaimana tercantum dalam alinia ketiga Pembukaan UUD 1945, sebagai naskah penjelmaan proklamasi kemerdekaan dan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental negara Indonesia, jadi ketaatan religius ini memiliki tiga sumber, yaitu : dasar filsafat, ketentuan hukum positif yaitu dalam UUD 1945, dan dalam proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945 yang dituangkan dalam pembukaan UUD 1945

d. Ketaatan mutlak, yaitu adanya kekuasaan sebagai bawaan hakikat organisasi hidup bersama dalam bentuk bermasyarakat dan negara, yang mewajibkan adanya penguasa dan ketaatan mutlak yang khusus sebagai bawaan dari pernyataan kemerdekaan yang terjelma dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa “Kemerdekaan adalah hak segala bangsa”.

Maka dapatlah disimpulkan bahwa dalam rangka realisasi Pancasila sangat diperlukan suatu kondisi yang mutlak untuk terlaksananya pengamalan tersebut, yaitu pendorong lahir dan batin dan ketaatan yang meliputi ketaatan hukum, ketaatan moral, ketaatan

religius, serta ketaatan mutlak yang bersumber pada hakikat kodrat. (Notonagoro, 1971).

3. Kesadaran Untuk mengamalkan Pancasila

Ketaatan adalah berdasarkan atas kesadaran, jadi ketaatan akan terwujud bilamana ada suatu kesadaran. Oleh karena itu dalam pengamalan pancasila perlu diusahakan suatu kesadaran, agar terwujud adanya ketaatan.

Kesadaran adalah hasil perbuatan akal, yaitu pengamalan tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri manusia sendiri. Jadi keadaan-keadaan inilah yang menjadikan objek dari kesadaran dan berupa segala sesuatu yang dapat menjadi pengamalan manusia. Pengamalan itu bersifat jasmaniah maupun rokhaniah, dan kehendak manusia. Hal itu dapat dilihat pada **Rasa**, menimbulkan realisasi tentang kejiwaan (estetis); **Akal**, yang menimbulkan realisasi tentang kebaikan/kebenaran; **Kehendak**, yang menimbulkan realisasi tentang kebaikan /kebenaran (etis) dan realisasi tentang kebahagiaan. Jadi kaitan dengan tingkah laku manusia.

Ketiga pengamalan tentang nilai-nilai hidup tersebut meliputi lingkungan hidup kebendaan, kerokhaniah, dan religius, baik lingkungan hidup pribadi (individu) maupun lingkungan hidup sosial. Apabila telah terdapat kesadaran itu tadi, maka dapat dikatakan telah ada kesadaran tentang penjelmaan hidup, kemanusiaan, akan tetapi hal

ini belum dapat dikatakan telah ada suatu kesadaran hidup. Agar supaya ada suatu kesadaran hidup maka harus ada cakupan segala objek kesadaran dalam suatu rangka kesatuan, yang memungkinkan orang memiliki sikap atau pandangan hidup (*way of life*) yang menuju tercapainya tujuan hidup keduniawian maupun kerokhaniaan. Dengan adanya kesediaan memenuhi pedoman-pedoman, peraturan-peraturan hidup, nilai-nilai hidup dan syarat-syarat pelaksanaan dari padanya, maka seseorang telah memiliki moral yang terjelma dalam pandangan hidupnya. (Notonagoro, 1971)

Jadi bilamana diurutkan maka agar manusia sampai pada suatu tingkat kesiapan untuk mengamalkan Pancasila, maka yang pertama harus diketahui, yaitu meresapi dan menyadari, kemudian menghayati dan pada akhirnya mewujudkannya. Tanpa adanya syarat-syarat tersebut mustahil upaya pelaksanaan Pancasila dapat terlaksana dengan baik. Hal ini diperlukan waktu yang cukup lama dan hal ini hanya dapat dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang terarah dan berkesinambungan. Adapun kesadaran dan kesiapan untuk pelaksanaan dapat dilakukan dalam praktek hidup sehari-hari, dalam masyarakat, melalui pendidikan, maupun dalam kenyataan hidup sehari-hari.

4. Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila

Bilamana kira ringkas pemahaman dan pengamalan Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahanan ideologis tahapannya adalah sebagai berikut:

- a. Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap, dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserap dan dihayati, sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan diri sendiri, memahami, serta ingat kepada Pancasila.
- b. Tingkatan dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu suatu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk merealisasikan Pancasila.
- c. Tingkatan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan bermasyarakat.
- d. Tingkatan menjadi mentalitas, yaitu selalu terselenggaranya kesatuan lahir batin, kesatuan akal, rasa, kehendak sikap dan perbuatan, mentalitas ini melalui sesuatu proses pengulangan dan kestabilan dan berkembang menjadi watak. Kemudian diresapkan lebih lanjut dalam jiwa sehingga terbentuk hati nurani. Dengan demikian orang senantiasa mengamalkan pancasila dengan selalu disertai pengenalan pada diri sendiri dalam bentuk memberi isyarat

memberi pedoman kepada diri sendiri sebelum melakukan perbuatan. Hal ini meliputi: perintah atau larangan berbuat, anjuran atau larangan tidak berbuat, membiarkan berbuat atau tidak berbuat, keseluruhannya harus ditaati sendiri

- e. Tingkatan mengadakan penilaian diri setelah melakukan suatu perbuatan yang bersangsi. Sangsi ini dapat berujud; pujian atau celaan kepada diri sendiri, yaitu celaan sampai dapat penjelma menjadi penderitaan
- f. Bilamana kondisi penghayatan dan pengamalan Pancasila sampai pada tingkat yang optimal maka orang akan memiliki kepribadian Pancasila. Hal itu seharusnya mempunyai semangat dan keteguhan hati dalam bentuk :
 - 1). Kemampuan, daya (kekuatan) serta cara bagi pemeliharaan dan pengembangan pengamalan Pancasila.
 - 2). Kemampuan, daya (kekuatan) serta cara untuk menyampaikan Pancasila kepada generasi penerus maupun orang lain
 - 3). Kemampuan, daya (kekuatan) serta bagi pengembangan dan pengaktualisasian pancasila
 - 4). Meningkatkan semangat dan keteguhan hati yang demikian itu menjadi keyakinan Pancasila, yaitu keyakinan akan kebenaran Pancasila kemudian meningkatkan menjadi keteguhan keyakinan terhadap Pancasila. Akhirnya merupakan ketahanan ideologis.

Suatu ketahanan ideologis merupakan suatu syarat mutlak bagi tercapainya tujuan cita-cita nasional, dan yang terpenting mampu menangkal pengaruh ideologi maupun gerakan intervensi ideologi dari negara asing (Notonagoro. 1976)

5. Pengamalan Pancasila yang Subjektif

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan dalam pribadi perseorangan, setiap warga negaranya, setiap individu, setiap penduduk, setiap penguasa dan setiap orang Indonesia. Pengamalan Pancasila yang subjektif ini justru yang lebih penting karena realisasi yang subjektif merupakan persyaratan bagi pengamalan Pancasila yang objektif (Notonagoro, 1975). Dengan demikian pengamalan Pancasila yang subjektif ini sangat berkaitan dengan kesadaran, ketaatan serta kesiapan individu untuk merealisasikan Pancasila. Dalam pengertian inilah pelaksanaan Pancasila yang subjektif yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah terpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib untuk melaksanakan pancasila bukanlah hanya akan menimbulkan akibat hukum namun yang terlebih penting lagi akan menimbulkan akibat moral. Dalam pengertian inilah maka fenomena kongkrit yang ada pada seseorang yang berkaitan dengan sikap dan tingkah laku seseorang dalam realisasi Pancasila secara subjektif disebut moral Pancasila. Maka Pengamalan Pancasila

bersifat subjektif ini lebih berkaitan dengan kondisi objektif, yaitu berkaitan dengan norma-norma moral.

Dalam pengamalan Pancasila yang bersifat subjektif ini bilamana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi dan dihayati oleh seseorang maka seseorang itu telah memiliki moral pandangan hidup. Bilamana hal ini berlangsung secara terus-menerus sehingga nilai Pancasila telah melekat dalam hati sanubari bangsa Indonesia maka kondisi yang demikian disebut dengan kepribadian Pancasila. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia telah memiliki suatu ciri khas, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain.

Bilamana pengertian ini diterapkan pada bangsa Indonesia sebagai kelompok manusia Indonesia, pengertian kepribadian ini dapat dikembalikan kepada hakikat manusia. Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu: 1) hakikat abstrak, yaitu terdiri dari unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan halnya itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda bangsa jenis lain. Misalnya jenis manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya. Oleh karena itu hakikat abstrak bersifat abstrak, umum universal, 2). Hakikat pribadi, yaitu memiliki ciri-ciri yang khusus, yang tetap melekat pada sesuatu sehingga membedakan sesuatu itu dengan yang lainnya. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi inilah yang disebut kepribadian. Dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak, 3) hakikat kongkrit,

adalah hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonesia ini memiliki tingkatan yaitu:

- a. Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan ‘monopluralis’, jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum uniersal. Dalam pengertian ini disebut dengan kepribadian kemanusaiaan karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat-sifat kemanusiaan.
- b. Kepribadiaan yang mengandung sifat-sifat kemanusiaan yang telah terjelma dalam sifat-sifat khas kepribadian Indonesia, yakni kepribadian pancasila dan ditambah dengan sifat-sifat yang tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain.
- c. Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat-sifat tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan, situasi dan kondisinya. Dalam pengertian yang ketiga ini sebagai realisasi kongkrit sehingga bersifat tidak tetap (Notonagoro, 1971)

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengamalan subjektif dari Pancasila, meliputi pelaksanaan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia

dan dalam pelaksanaan kongkritnya tercermin dalam tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari

6. Pengamalan Pancasila yang Objektif

Pengamalan Pancasila yang objektif, adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik dibidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif dan semua bentuk bidang kenegaraan dan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Hal itu antara lain dirinci sebagai berikut :

- a. Tafsir Undang-Undang Dasar 1945, harus dilihat dari sudut dasar filsafat negara Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinie IV
- b. Pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 dalam Undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran yang tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia
- c. Tanpa mengurangi sifat-sifat Undang-Undang yang tidak dapat di ganggu gugat, interpretasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam filsafat negara.
- d. Interpretasi pelaksanaan Undang-Undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan di bawah Undang-Undang dan keputusan-keputusan administrasi pusat sampai dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-

keputusan pengadilan serta alat perlengkapannya begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan rakyat.

e. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertib hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas politik dan tujuan negara yang berdasarkan atas dan diliputi asas kerokhaniaan Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan UUD 1945 juga didasarkan atas asas kerokhaniaan Pancasila. Bahkan yang terlebih penting lagi adalah dalam realisasi pelaksanaan kongkritnya yaitu dalam setiap penentuan kebijaksanaan dibidang kenegaraan antara lain:

- 1). Garis Besar Haluan Negara
- 2). Hukum dan perundang-undangan dan peradilan
- 3). Pemerintahan
- 4). Politik dalam dan luar negeri
- 5). Keselamatan, keamanan dan pertahanan
- 6). Kesejahteraan
- 7). Kebudayaan
- 8). Pendidikan
- 9). Reformasi dan segala pelaksanaannya (Kaelan, M.S, 2009).

7. Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Pengamalan Pancasila yang subjektif adalah pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada setiap individu, perseorangan, setiap warganegara, setiap penduduk Indonesia, setiap aparat pelaksana negara, dalam segala aspek kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berbeda dengan pelaksanaan yang objektif. Pelaksanaan Pancasila secara objektif, yaitu realisasi serta implementasi nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek penyelenggaraan negara, terutama dalam kaitannya dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam implementasi penjabaran Pancasila yang bersifat objektif merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kedudukannya sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang realisasi kongkritnya merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu implementasi Pancasila yang objektif ini berkaitan dengan norma-norma hukum dan secara lebih luas dengan norma-norma kenegaraan.

Namun demikian sangatlah mustahil implementasi Pancasila secara objektif dalam bidang kenegaraan dapat terlaksana dengan baik tanpa didukung oleh realisasi Pancasila yang subjektif yaitu pelaksanaan Pancasila pada setiap individu, perseorangan termasuk pada penyelenggaraan negara dalam hidup bersama yaitu berbangsa dan bernegara. Bahkan Notonagoro (1971) mengatakan, bahwa

pelaksanaan Pancasila yang subjektif justru lebih penting dan lebih menentukan daripada pelaksanaan Pancasila yang objektif. Dalam arti pelaksanaan Pancasila yang subjektif merupakan persyaratan bagi keberhasilan Pancasila yang objektif. Implementasi pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan kenegaraan akan mengalami suatu kegagalan bilamana tidak didukung oleh manifestasi pelaksanaan Pancasila yang subjektif baik oleh setiap warga negara terutama oleh setiap penyelenggara negara.

Dalam penjelasan resmi pembukaan UUD 1945, yang termuat dalam Lembaran Negara Berita Republik Indonesia tahun II No. 7 dinyatakan, bahwa dalam pelaksanaan kehidupan kenegaraan 'negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini berarti mengandung suatu konsekuensi logis bahwa Undang-undang Dasar 1945 harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan para penyelenggara negara untuk memelihara moral budi pekerti kemanusiaan yang luhur memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur.

Hal ini bahwa pelaksanaan Pancasila yang subjektif itu dapat terlaksana dengan baik manakala tercapainya suatu keseimbangan kerokhaniaan yang mewujudkan suatu bentuk sinergi dalam suatu bentuk kehidupan keharmonisan yang mewujudkan bentuk kehidupan yang memiliki keseimbangan kesadaran wajib hukum dengan kesadaran wajib moral.

Sebagai manusia yang hakikat sifat kodratnya adalah sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam merealisasikan hakikat martabat kemanusiaannya senantiasa memerlukan orang lain. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa ditakdirkan berkelompok-kelompok, bergolong-golongan, bersuku-suku serta berbangsa-bangsa tidak lain adalah untuk menjalin suatu hubungan yang harmonis, menjalin suatu hubungan kemanusiaan yang positif serta untuk saling mengenal. Dalam pengertian inilah maka manusia harus meletakkan dasar kemanusiaan dalam hubungan interaktif dengan sesama manusia. Keharusan untuk melaksanakan kewajiban ini merupakan suatu wajib moral yang harus ada pada setiap warga negara. Adapaun dalam kehidupan kenegaraan sebagai lembaga kehidupan kemasyarakatan hukum, ikatan kebersamaan dalam hidup bersama itu juga harus terealisasi dalam suatu hukum positif sehingga konsekuensinya kewajiban itu tidak hanya dalam batas-batas moral saja namun juga meliputi wajib hukum.

Berbeda dengan pemenuhan wajib terkandung dalam pengamalan Pancasila secara subjektif, pengamalan Pancasila secara objektif berkaitan dengan pemenuhan wajib hukum yang memiliki norma-norma yang tertuang dalam suatu sistem hukum positif. Hal ini dimaksudkan agar memiliki daya imperatif secara yuridis. Walaupun pengamalan objektif tertuang dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan, namun dalam implementasi

pelaksanaan Pancasila secara optimal justru ralisasi subjektif yang memiliki kekuatan daya imperatif moral merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan pelaksanaan Pancasila secara objektif. Dengan perkataan lain pengamalan subjektif lebih menentukan keberhasilan pengamalan Pancasila yang objektif dan tidak sebaliknya. Dapat juga dikatakan bahwa pengamalan secara objektif itu akan berhasil secara optimal bilamana didukung oleh pengamalan Pancasila secara subjektif.

Hal ini terbukti dalam sejarah pelaksanaan Pancasila selama ini, yang dalam kenyataannya tidak mendasarkan pada interpretasi pelaksanaan Pancasila sebagaimana terkandung dalam penjelasan pembukaan UUD 1945, yang menjelaskan bahwa UUD harus mengandung isi yang mewajibkan kepada pemerintah dan penyelenggaraan negara untuk memegang dan memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang cita-cita rakyat yang luhur. Pada masa orde lama dengan konsep Nasakom dan demokrasi terpimpinnya, maka dalam pengertian ini para penyelenggara negara tidak mendasarkan pada dasar moral rakyat yang luhur bahkan juga tidak mendasarkan pada wajib hukum kenegaraan

Demikian pula pada masa orde baru dimana penyelenggaraan negara tidak mendasarkan pada cita-cita moral rakyat yang luhur, pelaksanaan penyelenggaraan negara dipenuhi dengan KKN serta memfungsikan Pancasila sebagai alat legitimasi politik untuk

mempertahankan kekuasaan, sehingga rakyat banyak yang menderita, sedangkan pejabat negara berlomba menimbun kekayaan walaupun seakan-akan memenuhi wajib hukum (Kaelan, 2009).

DAFTAR PUSTAKA

- Adisusilo, S. (2014). *Pembelajaran Nilai Karakter. Konstruktivisme dan VCT sebagai Inovasi Pendekatan Pembelajaran Afektif*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Arends, Richard I. (1997). *Classroom International and management*. New York : Mc-Graw Hill
- Azwar, S. (2013). *Tes Prestasi. Fungsi dan pengembangan pengukuran Prestasi Belajar*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____ (2013). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Aqib, Z. (2013). *Model-Model, Media, dan Strategi Pembelajaran Kontekstual*. Bandung : Cv. Yrama Widya.
- Borba, M. (2001). *Building Moral Intelligence. (Membangun Kecerdasan Moral)*. Alih Bahasa: Lina Yusuf. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Borg, Walter R dan Gall, Meredith D. (1983). *Educational Research: An Introduction*. New York: Longman.
- _____ (2007). *Educational Research. An Introduction*. New York : Longman
- Briggs, L.J. (1978.). *The theoretical and Conceptual Baced of Instructional Design*. London : Kogan Page
- Brophy, Jere. (2004). *Motivating student to Learning*. New Jersey : Lawrence Erlbahum Associates.
- Creswell, JW. Plano C& Vicky L, (2007). *Designing and conducting mixed methods research* . Thousand Oaks-London: Sage Publications.
- Daroeso, B. (1986). *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Daroeso, B. & Suyahmo. (1989). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta: Liberty.
- Darmodihardjo, D. (1988). *Pancasila, Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta : Balai Pustaka.
- _____ . (1996). *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta : Gramedia
- Dick, Walter :Carey, Lou & Carey, James O. (2009). *The Sysrematic Design Instructional* . New Jersey : Pearson Education Upper Saddle River.
- Djahiri, A. K. (1985). *Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan games dalam VCT*. Bandung : F.IPS IKIP Bandung.

- Ellen A. Benowitz. (2001). *Principles of Management*. New York : Hungry Minds.
- Ellis, A.K. (1998). *Teaching and Learning Social Studies*. Six Edition . Boston : Allyn dan Bacon.
- Elmubarak, Z. (2008). *Membumikan Pendidikan Nilai* , Alfabeta : Bandung.
- Frank, M. & Barzilai, A. (2006). Project-Based Technology : Instructional Strategy For Developing Technological Literacy. *Journal of technology*
- Haider, A.S.K. (2013). The Impact of Motivation on Learning of Secondary School Student in Karachi : An Analytical Study. *Journal Education Research International*. Vol 2 No. 2. *Education* .18.(1) : 39-53.
- Heuken, A. SJ. (1988). *Ensikloprdi Populer Politik Pembangunan Pancasila*. Jakarta:Yayasan Cipta loka Caraka.
- Hall, B. (1973). *Value Clarification as Learning Process*. New York : Paulist Press.
- _____. (1982). *Readings in Value Development*. New Jersey : Paulist Press.
- Hill, B.V. (1991). *Values Education in Australian Schools*. Victoria : The Australian Council for Education Research LTd. Radford House.
- Hosnan, M. (2014). *Pendekatan Saintifik dan Kontekstual dalam Pembelajaran Abad 21*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- Ishak, Aswad, Ed. (2011). *Mix Mithodology dalam Penelitian Komunikasi*. Yogyakarta : Aspikom.
- Johnson. B, Elaine. (2002). *Contextual Teaching and learning*. California : Coewin press. Inc.
- Jacobsen, Eggen, and Kauchak, Donald. (2009). *Methods for Teaching*. New Jersey : Pearson Education, Inc.
- Joyce, B & Weil M, (2009). *Model Of Teaching*. New Jersey, Prentice- Hall, Inc
- Joyce, Marsha, Calhoun, (2009). *Model Of Teaching (Alih Bahasa: Ahmad Fawaid dan Ateilla Mirza)* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartini, K. & Guno, D. (2003). *Kamus Psikologi*. Bandung : Pioner jaya.
- Kaelan, M.S. (1993). *Pancasila Yuridis Kenegaraan*. Yogyakarta : Paradigma
- _____. (2002). *Filsafat Pancasila*. Yogyakarta : Paradigma.

- Keller, J.M. (2010). *Motivasi Design for Learning and Performance. The ARCS model approach*. New York : Springer
- Kattsoff, Louis O., (1986). Pengantar Filsafat. Diterjemahkan Soejono Soemargono. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kratwohl, Davi R., Bloom, Benyamin S., Dan Masia, Betram B., (1964). *Taxonomi of Educational Objectif Handbook II. Alternatif domain*. London : Longman Group.
- Lickona, Th. (1992). *Educating for Character, How our school can teach respect and responsibility*. New York : Holt, Rinechart and Winston.
- Linda & Eyre, R. (1997). *Mengajarkan Nilai-nilai kepada Anak* (terjemahan Alex Tri Kartono Widodo). Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.
- Mawardi, L. (2009). *Evaluasi Pendidikan Nilai, Perkembangan Moral Keagamaan Mahaiswa*. Yogyakarta : Pustaka pelajar.
- Mayer, R.E. (2008). *Leraning and Instruction* . New Jersey: Pearson.
- Muhaimin. (2002). *Paradikma Pendidikan Islam: upaya mengefektifkan pendidikan agama islam di sekolah*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Mustofa, M. (2011). *Konstruksi Filsafat Nilai : antara normatifitas dan realitas*. Makasar : Alaudin Pers.
- Muhajir, A. (2011). *Ilmu Pendidikan Perpektif Kontekstual*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nurhadi. (2003). *Pendekatan Kontekstual* . Jakarta : Depdiknas.
- Notonagoro. (1971). *Pengertian Dasar bagi Implementasi Pancasila untuk ABRI*. Jakarta: Depertemen Pertahanan dan Keamanan.
- _____. (1974). *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- _____. (1975). *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta : Pantjuran Tudjuh.
- Oesman, O. & Alfian. (1993). *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta : BP-7
- Supriyono, A. (2010). *Cooperatitive Learning (Teori dan Aplikasi Paikem* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soegito, A.T. (2002). *Pendidikan Pancasila*. Semarang : UPT MKU UNNES
- Samani, M. & Haryanto. (2012). *Konsep dan Model Pendidikan Karakter*. Bandung : PT Remaja Rosda Karya.

- Sagala, S. (2009). *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Santrock J,W. (2007). *Educational Psychology*. New York : Mc Graw-Hill.
- Sardiman, A.M. (2002). *Interkasi dan motivasi Belajar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhadi. (2001). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta : Yayasan pembinaan Fakultas Filsafat UGM
- Suyanto. (2010). *Urgensi Pendidikan Karakter/* artikel pendidikan/ maret 2010.
- _____. (2003). *Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Melenium Ketiga*. Yogyakarta : Adi Cita Karya Nusa.
- Supriyoko. (2003). Menuju Masyarakat tertib damai salam bahagia sebagai karakter bangsa masa depan. Makalah Disampaikan dalam forum Sarasehan Kebudayaan. Yogyakarta : 19-20 Mei 2003.
- Sugiyanto. (2010). *Model-model Pembelajaran Inovatif*. Surakarta : Panitia Sergur Rayon 113 Surakarta.
- Supriyadi, D. (1998). *Isu dan Agenda Pendidikan Tinggi di Indonesia*. Jakarta : PT Rosda Jaya Putra.
- Sanjaya, W. (2003). *Strategi pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta ; Kencana prenada Media Grup.
- Smith. P.L & Ragan. T.L., (2003). *Instructional Design*. Upper Saddle River, NJ. Merril Prentice Hall. Inc.
- _____. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Menceerdaskan Kehidupan Bangsa*. Bandung : Widya Aksara Press.
- Uno, H. (2007). *Model pembelajaran menciptakan kegiatan Belajar Mengajar Kreatif Efisien*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Ushida, E. (2005). The Role Student' Attitudes and Motivation in Second Language Learning in Online language Courses. *Calico Journal*. Vol. 23, No. 1.
- Winaputra, U. S. (2006). *Konsep dan Strategi Pendidikan Moral Pancasila (Suatu Penelitian Kepustakaan)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Zakiyah, Q. Y. & Rusdiana. (2014). *Pendidikan Nilai. Kajian Teori dan Praktek*. Bandung : Pustaka Setia.

Zubaidi. (2005). *Pendidikan Berbasis Masyarakat : Upaya menawarkan solusi terhadap berbagai problem sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.